

**PENGARUH PENGELOLAAN ASET TETAP TERHADAP *QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING* DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERATING**  
(Studi pada SKPD Kabupaten Jeneponto)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :  
**JUIMARLIANA**  
90400114160

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juimarliana  
NIM : 90400114160  
Tempat / Tgl. Lahir : Sandakan / 29 November 1995  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi  
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : BTN. Panorama Indah, Samata  
Judul : Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap *Quality Of Regional Goverment Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2018

Penyusun

JUIMARLIANA  
NIM : 90400114160

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap Quality Of Regional Government Financial Reporting Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)”** yang disusun oleh **Juimarliana**, NIM: **90400114160**, Mahasiswi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1440 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa,

November 2018

Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
Sekertaris : Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag  
Munaqisy I : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M. Si  
Munaqisy II : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag  
Pembimbing I : Jamaluddin M, S.E., M.Si.,  
Pembimbing II : Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
NIP. 19581022 198703 1 002

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan Rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur Jahiliyah, menuju kepada peradaban yang Islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Jeneponto)”** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Alamuddin dan Ibunda Siti Hadenah yang telah melahirkan,



mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
4. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Jamaluddin M, SE., M. Si selaku pembimbing I dan Ibu Nur Rahma Sari, SE., M.Acc selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. Wahyuddin Abdullah S.E M,Si.,Ak selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan nasihat.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.
8. Seluruh staf akademik, dan tata usaha, serta staf jurusan Akuntansi UIN alauddin Makassar.
9. Kantor Dinas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2014 Contabilita terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.

11. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, kakak-kakak maupun adik-adik tercinta, terimakasih atas persaudaraannya.
12. Kepada kakak tercinta saya Satriana, Ratna dan Bambang Hari Purnomo yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.
13. Kepada sahabat terbaik saya Rusita Kusuma Wardani dan Rahman yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.
14. Semua keluarga, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Amin Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan tentu datangny dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sumber ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Penulis,

**JUIMARLIANA**  
**904001141160**

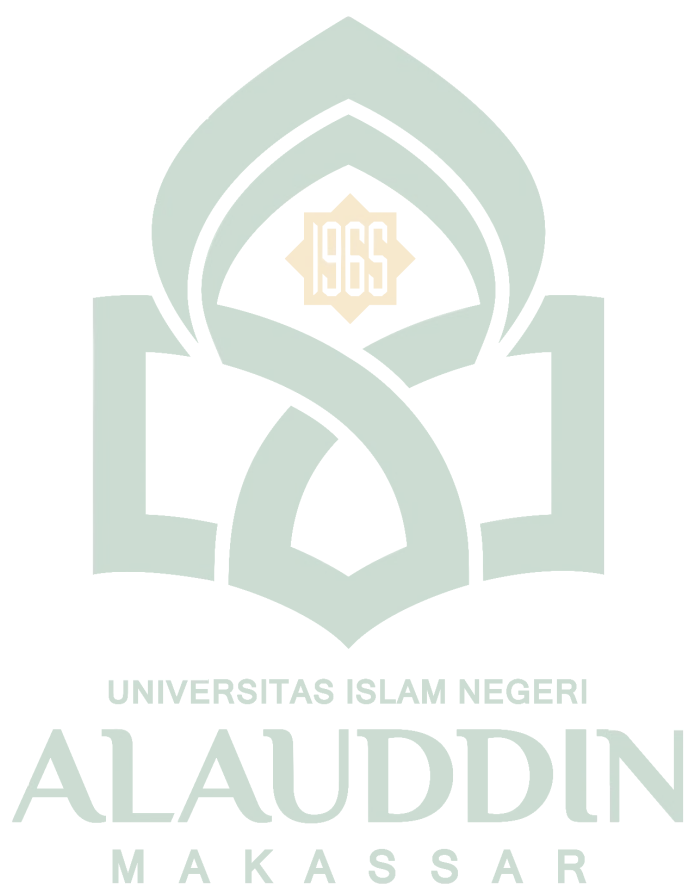
## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Hipotesis.....	9
D. Definisi Operasional Variabel.....	15
E. Penelitian Terdahulu .....	17
F. Tujuan Penelitian .....	21
G. Manfaat Penelitian .....	22
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Kepatuhan( <i>Compliance Theory</i> ).....	23
B. <i>Assets Inventory</i> .....	25
C. <i>Assets Legal Audit</i> .....	29
D. <i>Assets Valuation</i> .....	33
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	34
F. <i>Quality Of Regional Government Financial Reporting</i> ....	36
G. Rerangka Pikir.....	39
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Populasi dan Sampel .....	41

C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Instrument Penelitian .....	43
F. Analisis Deskriptif .....	44
G. Uji Kualitas Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
B. Hasil Penelitian .....	63
C. Analisis Deskriptif Variabel .....	68
D. Hasil Uji Kualitas Data .....	79
E. Uji Asumsi Klasik.....	83
F. Hasil Uji Hipotesis .....	88
G. Pembahasan.....	99
<b>BAB VII : PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Keterbatasan Penelitian.....	112
C. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Rerangka Teoretis.....	40
Gambar 4.1 : Hasil Uji Normalitas .....	84
Gambar 4.2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	86





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jenepono Dalam Lima Tahun Anggaran 2012 s.d 2016.....	4
Tabel 1.2 : Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 : Data Distribusi Kuesioner.....	64
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	65
Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	66
Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan Tinggi Pendidikan .....	67
Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	68
Tabel 4.6 : Statistik Deskriptif Variabel .....	69
Tabel 4.7 : Deskriptif Item Pernyataan Variabel Assets Inventory .....	71
Tabel 4.8 : Deskriptif Item Pernyataan Variabel Assets Legal Audit .....	73
Tabel 4.9 : Deskriptif Item Pernyataan Variabel Valuation.....	74
Tabel 4.10: Deskriptif Item Pernyataan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	76
Tabel 4.11: Deskriptif Item Pernyataan Variabel Quality Of Regional Government Financial Reporting .....	78
Tabel 4.12: Hasil Uji Validasi .....	81
Tabel 4.13: Hasil Uji Realibilitas.....	82
Tabel 4.14: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	84
Tabel 4.15: Hasil Uji Multikolinearitas .....	85
Tabel 4.16: Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	87
Tabel 4.17: Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	89
Tabel 4.18: Hasil Uji f-Uji Simultan .....	90
Tabel 4.19: Hasil Uji t-Uji Parsial .....	91
Tabel 4.20: Hasil Uji Koefisien Determinasi (R) .....	94
Tabel 4.21: Hasil Uji f- Uji Simultan Moderating.....	95
Tabel 4.22: Hasil Uji t-Uji Parsial .....	96
Tabel 4.23: Pengujian Hipotesis .....	100

## ABSTRAK

**Nama : Juimarliana**

**Nim : 90400114160**

**Judul : Pengaruh *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, dan *Assets Valuation* Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Jeneponto)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan aset terhadap *quality of regional government financial reporting* dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Kerja/ SKPD di Kabupaten Jeneponto. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang berpengalaman dalam bidang pengelolaan aset barang milik daerah dengan masa kerja minimal 3 tahun. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dibagikan secara langsung kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak. Analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis *assets inventory*, *assets legal audit* dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Analisis regresi moderasi dengan nilai selisih mutlak untuk hipotesis *assets inventory*, *assets legal audit* dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting* dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating.

Hasil penelitian ini dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *assets inventory*, *assets legal audit* dan *assets valuation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting*. Analisis regresi moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting*, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi *assets inventory* dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*.

**Kata kunci :** *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*, Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat harus memenuhi kualitas yang diinginkan. Kualitas yang diinginkan diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara penuh yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Penggantian Standar Akuntansi Pemerintahan ini akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah karena mengingat bahwa penggunaan akuntansi berbasis kas menuju ak rual akan berakhir pada tahun 2014, yang tentunya hal ini harus menuntut kesiapan seluruh Instansi Pemerintah di setiap daerah baik Provinsi, Kota / Kabupaten (Ranuba,dkk, 2015) (Wijayanti dan Handayani, 2017). Peraturan ini menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah diperlukan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan

biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan laporan keuangan daerah (Setiawan dan Gayatri, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas daerah tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tidak lepas dari peran seorang auditor yang profesional. Auditor diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara profesional sehingga hasil pekerjaan yang dihasilkan akan berkualitas juga karena hasil pekerjaan yang berkualitas berhubungan dengan keterampilan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan kemandirian perusahaan (Majid, 2018). Hasil kerja dari seorang auditor atau pemeriksa akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Terdapat lima opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Rahman, 2015). Penerimaan opini pada setiap daerah

tergantung dari kepatuhan perangkat daerah tersebut dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan undang-undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance* (Septiani, 2005; Ramli, 2014).

Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan kecenderungan yang memprihatikan, yaitu dengan adanya kecenderungan kualitas laporan keuangan yang semakin memburuk (Anshari dan Syofyan, 2016). Kualitas laporan keuangan yang semakin menurun menggambarkan bahwa adanya penurunan atau ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Terlihat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam lima tahun anggaran terakhir, Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperoleh opini yang belum memuaskan bagi semua pihak bahkan sedikit mengecewakan, seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut ini:



**Tabel 1.1**  
**Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah**  
**Kabupaten Jeneponto dalam Lima Tahun Anggaran 2012 s.d 2016**

No.	Tahun	Opini
1.	2012	Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer Opinion</i> )
2.	2013	Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer Opinion</i> )
3.	2014	Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer Opinion</i> )
4.	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5.	2016	Tidak Menyatakan Pendapat ( <i>Disclaimer Opinion</i> )

Sumber: BPK-RI

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum pernah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini antara lain terjadi karena Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto belum tertib. Tertibnya pengelolaan barang (aset) milik daerah membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian necara daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan (BPK RI, 2017; Antara, 2017) .

Terkait dengan kasus diatas terdapat ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu *asset inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation*. Salah satu siklus pengelolaan aset adalah *assets inventory*. *Assets inventory* adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian (Supit dkk, 2017). *Assets inventory* merupakan “jantung” di dalam

siklus pengelolaan aset. Tentunya keberadaan aset atau barang-barang milik daerah tersebut perlu diinventarisasi dan dilaporkan kepada pihak Sekretariat daerah masing-masing agar peruntukan dan keberadaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wahyuni, 2015). Oleh karena itu, dengan adanya *assets inventory* yang tertertib maka pembukuan terhadap aset milik daerah tersebut akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Tidak hanya *assets inventory*, *assets legal audit* juga harus dilakukan dalam pengelolaan aset milik daerah karena masalah yang sering dihadapi dalam *assets legal audit* adalah menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain (Montayop,dkk, 2016). *Assets legal audit* merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset (Limbong, 2016). *Assest legal audit* ini sangat berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah hukum yang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama maka *assets legal audit* ini diterapkan dalam pengelolaan barang milik daerah.

*Assets valuation* adalah penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dilakukan oleh penilai pemerintah maupun penilai publik yang independen yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota (PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016). Penilaian BMD yang baik

akan menghasilkan penyajian neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah (Poe, dkk. 2017). Oleh karena itu, penilaian BMD yang baik dilakukan oleh seorang penilai yang profesional guna menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian terkait dengan intensi ataupun faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan yaitu ( Yensi, dkk, 2014; Montayop, dkk, 2016; Poe, dkk, 2017; Asman, dkk, 2016; Anshari dan Syofyan, 2016; Jamaluddin, 2017; Demetouw, dkk, 2017; Nasution, dkk, 2015; Andiani, dkk, 2017; Febrianti, 2016; Sherly, dkk, 2017; Mahardini, 2018; Syahadatina dan Fitriyana, 2016; Pujanira dan Taman, 2017; Syarifuddin, 2014).

Perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Asman (2016) yang menyatakan bahwa *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset. Ini berarti bahwa semakin baik kegiatan *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* yang dilakukan maka akan semakin optimal pula pengelolaan terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nasution dkk (2017); Anshari dan Syofyan (2016); Montayop dkk (2016). Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian Febrianti (2016); Andiani dkk (2017) yang menyatakan hal yang sebaliknya, bahwa *assets inventory* tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan *assets legal audit*, penelitian Demetouw dkk (2017) menyatakan kurang ada pengaruh yang signifikan antara *assets legal audit* terhadap tingkat optimalisasi aset tetap (tanah

dan bangunan) pada Pemerintah. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian Jamaludin (2017) dan Sherly dkk (2017).

Pada kompetensi sumber daya manusia, hasil penelitian Mahardini dkk (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun anggaran 2015, ini berarti bahwa semakin kompeten sumber daya manusia pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Armel dkk (2017); Sari dan Tamrin (2016); Tawaqal dan Suparno (2017); Modo dkk (2016). Sedangkan, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk (2017) yang menyatakan bahwa kwalitaas sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bandung. Artinya bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka belum tentu akan mempengaruhi rendahnya kualitas laporan keuangan begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahadatina dan Fitriyana (2016); Syarifudin (2014); Karmila dkk (2014); Rumenser (2014); Ayem dan Husen (2017).

Dari hasil uraian *research gap* diatas menjadi salah satu alasan peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh *assets inventory*, *legal audit assets*, dan *assets valuations* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Selanjutnya, yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah penambahan moderasi kompetensi sumber daya manusia, karena variabel ini pada penelitian

sebelumnya hanya diuji pengaruhnya secara langsung dan belum pernah diuji perannya sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian ini dilakukan pada SKPD di kabupaten Jeneponto. Peneliti memilih daerah kabupaten Jeneponto karena laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian turun menjadi *disclaimer opinion*. Salah satu penyebab laporan keuangan mendapatkan opini diskalimer adalah adanya pengelolaan aset yang belum tertib secara administrasi di daerah tersebut. Hal ini banyak terjadi di lingkungan SKPD terutama pada tiga instansi yaitu Dinas PU, DPRD, dan Dinas Pertanian yang belum mampu melakukan perbaikan secara administrasi. Disamping itu, kompetensi sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam mengelola laporan keuangan pemerintah yang kurang membuat pemerintah Kabupaten Jeneponto menerima opini yang tidak diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dilakukan di SKPD kabupaten Jeneponto dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating”**.

### ***B. Rumusan Masalah***

Ketidakmampuan daerah dalam hal pengelolaan aset milik daerah menunjukkan banyak daerah yang belum mampu di inventarisasi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat sehingga membuat daerah rugi karena aset yang ada



tidak mampu dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat, dan bahkan mungkin jatuh kepada tangan yang tidak bertanggungjawab (Aira, 2014).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *assets inventory* berpengaruh terhadap *quality of regional government financial reporting*?
2. Apakah *assets legal audit* berpengaruh terhadap *quality of regional government financial reporting*?
3. Apakah *assets valuation* berpengaruh terhadap *quality of regional government financial reporting*?
4. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara *assets inventory* pada *quality of regional government financial reporting*?
5. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh terhadap hubungan *assests legal audit* pada *quality of regional government financial reporting*?
6. Apakah kompetensi SDM memoderasi pengaruh terhadap *assets valuation* pada *quality of regional government financial reporting*?

### C. *Hipotesis*

1. **Pengaruh *Assets Inventory* terhadap *Quality of Regional Government Financial Reporting***

Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Apabila dilakukan peningkatan terhadap *assets*

*inventory* yang ada maka akan meningkat pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah aset (Anshari dan Syofyan, 2016). Oleh karena itu, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan adalah inventarisasi.

*Assets inventory* yang baik akan memberikan prediksi adanya optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap yang akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Jamaludin, 2017). Oleh karena itu, pentingnya pelaksanaan *assets inventory* dilakukan di setiap instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Assets inventory* berpengaruh positif terhadap *quality of regional government financial reporting*.

## 2. **Pengaruh *Assets Legal Audit* terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting***

*Assets legal audit* merupakan pemeriksaan ke dalam perusahaan terhadap segala kegiatan dan dokumentasi yang berkenaan dengan hukum. *Assets legal audit* dikembangkan sebagai respon terhadap meningkatnya kebiasaan umum dari para pelaku bisnis dan individu sebagai usaha tindakan hukum, untuk menyelesaikan suatu sengketa sehingga dapat menghindari borosnya biaya dan proses pengadilan yang berlarut-larut, dengan menggunakan beberapa konsep atau teknik penanganan pencegahan (Anshari dan Syofyan, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya *assets legal audit* tersebut aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya dengan tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan pada saat masalah mengenai hukum.

Berdasarkan penelusuran dan fakta di lapangan, bahwa dalam rangka menjamin aspek legal audit terhadap aset yang dimiliki, pemerintah secara terus menerus melakukan upaya penertiban sertifikasi atas aset tanah yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Pemda, salah satunya yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN (Badan Pertahanan Nasional). Hal ini dilakukan guna menjamin keamanan aset dari segi legalitas sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan aset oleh pihak lain secara tidak sah dan menghindari biaya-biaya persengketaan aset (Asman dkk, 2016). Oleh karena itu, tertibnya keamanan aset akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Assets legal audit* berpengaruh positif terhadap terhadap *quality of regional government financial reporting*.

### 3. **Pengaruh *Assets Valuation* terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting***

Kegiatan *assets valuation* sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual (Montayop dkk, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya *assets valuation* ini akan mempermudah dalam

menyusun laporan keuangan yang berupa neraca yang akan menyajikan aset yang dimiliki oleh daerah.

Kegiatan penilaian dilakukan dalam rangka pengelolaan BMD yang merupakan implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindatanganan BMD serta penyusunan neraca pemerintah daerah (Poae dkk, 2017). Oleh karena itu, penilaian barang yang merupakan tahapan pengelolaan BMD, sangat penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang lebih baik karena hasil dari penilaian BMD inilah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pengelolaan aset/barang daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

$H_3$  : *Assets valuation* berpengaruh positif terhadap *quality of regional government financial reporting*.

#### 4. **Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Terhadap Hubungan Antara *Assets Inventory* Pada *Quality Of Regional Government Financial Reporting***

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensinya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil

(*outcome*) yaitu salah satunya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Pangaribuan dkk, 2017). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus mampu mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensinya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya untuk meminimalisir kesalahan (Mahardini dan Miranti, 2018; Pangaribuan dkk, 2017). Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka pelaksanaan *assets inventory* dapat dilakukan dengan baik. Pengguna barang atau pengelola aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Kualitas aparatur daerah sangat berperan penting dalam pengelolaan aset dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan (Azhar, 2017). Oleh karena itu, maka akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut aturan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis keempat adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kompetensi SDM memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan antara *assets inventory* pada *quality of regional government financial reporting*.

##### **5. Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Terhadap Hubungan Assests Legal Audit Pada Quality Of Regional Government Financial Reporting**

Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola



sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka waktu penyusunan laporan keuangan akan dapat dipersingkat, hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya (Tawaqal dan Suparno, 2017; Adhitama, 2017). Oleh karena itu, sumber daya manusia yang kompeten yang mampu menghasilkan laporan keuangan juga akan mampu melakukan tugasnya sebagai legal auditor dengan baik juga.

Pengelola barang, pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah ini merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *assets legal audit*. Pelaksanaan *assets legal audit* dilakukan oleh manusia sebagai pelaksana yang merupakan faktor esensial dalam penyelenggaraan pemerintah dan manusia merupakan subjek dalam aktivitas pemerintah. Dari semua pernyataan menyatakan bahwa peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik sangat berpengaruh terhadap pengamanan aset negara (Bokingo dkk, 2017). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis ke lima adalah sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : Kompetensi sdm memoderasi pengaruh positif terhadap hubungan *assets legal audit* pada *quality of regional government financial reporting*.

## 6. Kompetensi SDM Memoderasi Pengaruh Terhadap *Assets Valuation* Pada *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. *Assets valuation* merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen (Limbong dkk, 2016; Pujanira dan Taman, 2017). Oleh karena itu, dalam melakukan *assets valuation* haruslah sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang penilai aset. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik juga. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan hipotesis ke enam adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub> : Kompetensi SDM memoderasi pengaruh positif terhadap *assets valuation* pada *quality of regional government financial reporting*.

### D. Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *valuation assets*.

- a. *Assets inventory* ( inventarisasi aset) dalam penelitian ini berasal dari model pengukuran yang dikembangkan oleh indikator Asman dkk (2016). *Assets inventory* diukur dengan lima item pernyataan yang mengukur setiap tahapan pengelolaan aset melalui inventarisasi aset. Item pernyataan

tersebut dari indikator *assets inventory* diantaranya, 1) Inventarisasi fisik. 2) Inventarisasi yuridis/legal. Hasil pengukuran atas inventarisasi aset ini merupakan cerminan dalam mengelola aset milik daerah yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

- b. *Assets legal audit* dalam penelitian ini berasal dari model pengukuran yang dikembangkan oleh Asman (2016). *Assets legal audit* diukur dengan tujuh item pernyataan yang mengukur setiap tahapan dalam pengelolaan aset milik daerah melalui *assets legal audit*. Item pernyataan tersebut dari indikator *assets legal audit* diantaranya, 1) status penguasaan aset. 2) sistem dan prosedur penguasaan aset atau pemindahtanganan aset. 3) Pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas. Hasil pengukuran atas *assets legal audit* ini merupakan cerminan dalam mengelola aset milik daerah yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.
- c. *Assets valuation* dalam penelitian ini berasal dari model pengukuran yang dikembangkan oleh indikator Asman dkk (2016). *Assets valuation* merupakan suatu kesatuan kerja lanjutan dari suatu manajemen aset, yaitu berupa suatu kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian yang independent. *Assets valuation* (penilaian aset) diukur dengan tiga item pernyataan yang mengukur setiap tahapan pengelolaan aset melalui penilaian aset. Item pernyataan tersebut dari indikator *assets valuation* diantaranya, 1) Konsultan penilaian yang independen. 2) Nilai kekayaan aset tetap. 3) Informasi nilai kekayaan yang

terkandung di dalam aset. Hasil pengukuran atas penilaian aset ini merupakan cerminan dalam mengelola aset milik daerah yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (*quality of regional government financial reporting*). Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan sebelas item pernyataan yang dibuat dari indikator yang dikembangkan oleh Kurnianto (2017) diantaranya, 1) Relevan. 2) Andal. 3) Dapat dibandingkan. 4) Dapat dipahami.

## 3. Variabel Moderating

Kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan yang dibuat dari indikator yang dikembangkan oleh Kurnianto (2017) diantaranya, 1) Pengetahuan. 2) Keterampilan. 3) Pengalaman .

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*, yang kemudian adanya moderasi kompetensi sumber daya manusia yang merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Untuk dapat memudahkan dalam membandingkan dengan penelitian terdahulu dan memudahkan dalam membandingkan dengan penelitian ini maka secara sederhana disajikan dalam bentuk tabel seperti :

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Mahardini dan Miranti (2018)	Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015	Basis Akrual, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kualitas Laporan Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa basis akrual dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
2.	Jamaludin (2017)	Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB	Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Penilaian Aset, Dan Optimalisasi Aset	Variabel inventarisasi aset dan penilaian aset berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan). Sedangkan legal uadit aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan dan manajemen aset tetap (tanah dan bangunan).
3.	Andiani	Pengaruh Penatausahaan dan	Pembukuan, Inventarisasi,	Hasil penelitian ini

	dkk (2017)	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) Periode 2017	Pelaporan, Penerapan SIMAK BMN, Dan Kualitas Laporan Keuangan	menunjukkan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan sedangkan variabel pelaporan dan penerapan SIMAK BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Kurnianto (2017)	Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)	Penatausahaan, Baran Milik Daerah, Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Poae dkk (2017)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud	Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan, dan pengendalian BMD serta kualitas LKPD	Penilaian, panatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

				Sedangkan perencanaan BMD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
6	Syahadatina dan Fitriyana (2016)	Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Sumber daya manusia dibidang keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7	Anshari dan Syofyan (2016)	Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Padang	Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Kualitas Laporan Keuangan	Variabel inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, pengawasan dan pengendalian berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada

				Pemerintah Kota Padang.
8	Asman dkk (2016)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Pengawasan dan Pengendalian Aset, dan Optimalisasi Aset	Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi aset
9	Febrianti (2016)	Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya	Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Dan Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

#### ***F. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *assets inventory* terhadap *quality of regional government financial reporting*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*.



4. Untuk mengetahui pengaruh moderasi kompetensi SDM terhadap hubungan antara *assets inventory* terhadap *quality of regional government financial reporting* inventarisasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh moderasi kompetensi SDM terhadap hubungan *assests legal audit* pada *quality of regional government financial reporting*.
6. Untuk mengetahui pengaruh moderasi kompetensi SDM terhadap *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*.

#### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

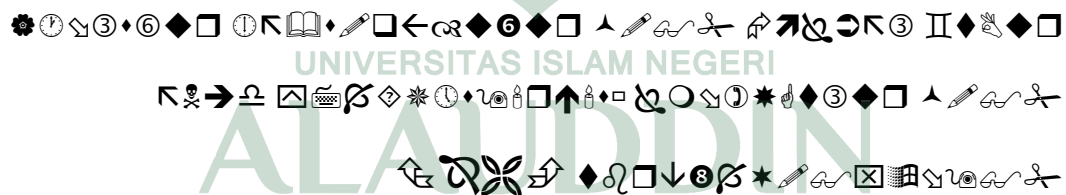
1. Manfaat Teoretis : Keberadaan inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset memberikan perhatian dalam mengelola aset tetap untuk memperoleh hasil yang baik guna keperluan pemeriksaan BPK-RI. Sehingga diharapkan memperoleh hasil audit/opini yang positif sesuai dengan harapan semua perangkat pemerintah daerah. Dalam perspektif teori kepatuhan yang mengharuskan merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*.
2. Manfaat Praktis : Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah dan bukti mengenai pentingnya pengelolaan aset tetap yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menyajikan neraca daerah dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Sebagaimana dijelaskan dalam alquran surah An-Nuur (24:52) mengenai kepatuhan terhadap sang pencipta.



Terjemahnya:

“Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, Maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”

Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa jaminan Allah SWT tentang kepatuhan atau ketaatan seorang muslim terhadap sang pencipta bahwa siapa yang mentaati semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya maka

akan merasakan kebahagiaan hidup baik dunia maupun di akhirat, dan selalu bertaqwa kepada-Nya, dan berbuat baik terhadap sesama manusia, maka mereka itu termasuk golongan orang-orang yang mencapai keridhoan Ilahi dan bebas dari segala siksaan-Nya di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas harus taat terhadap peraturan yang ada sehingga apa yang diharapkan dari hasil kerja tersebut dapat diperoleh sebagai kemenangan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelola Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*.

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) mempengaruhi pemberian *opini* BPK-RI atas LKPD

(Maabuat dkk, 2016). Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai dasar penilai BPK-RI dalam memberikan opini maka setiap LKPD wajib mentertibkan aset milik daerah yang berada di SKPD tersebut. Dengan patuhnya pegawai (sumber daya manusia) dalam melakukan inventarisasi aset, legal audit dan penilaian aset atas aset milik daerah maka akan menghasilkan optimalisasi dalam pengelolaan aset milik daerah yang nantinya akan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang akan menunjang pemberian opini oleh BPK-RI.

### ***B. Assets Inventory***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk dalam sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan dan sejarah (Mursyidi, 2013; Hasanah dan Fauzi, 2017).

Berdasarkan PP 24 Tahun 2005, aset tetap diklarifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasionalitas akuntansi. Klarifikasi aset tetap tersebut adalah sama menurut (Hasanah dan Fauzi, 2017; Mursyidi, 2013; Halim, 2014; Yuliansyah, 2016) :

1. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Seperti tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah sarana sosial, tanah sarana umum, tanah sarana stadion olahraga, tanah perumahan, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah perikanan, tanah peternakan, tanah perkampungan, tanah. Tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku.
2. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa pemanfaatannya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai. Seperti gedung kantor, gedung rumah, gedung gudang, bangunan bersejarah, bangunan monumen, tugu peringatan.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi jalan, jaringan air, jembatan, penerang jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
5. Aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang meliputi buku dan kepustakaan, barang bercorak kesenian, kebudayaan, hewan/ternak, dan tanaman yang

diperoleh untuk dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai.

6. Kontruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
7. Akumulasi Penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengklasifikasian aset tetap di atas merupakan aset yang perlu di inventarisasi. Setiap aset yang berada di lingkungan organisasi haruslah dapat diketahui keberadaannya, untuk itu *assets inventory* penting dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum atas aset tersebut dan mengetahui jumlah serta kondisi aset yang riil pada saat itu. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 ayat 48. Menurut Nasution dkk (2015), inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan terhadap BMD. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pembukuan aset atau pelaksanaan penatausahaan/administrasi sehingga seluruh BMD dapat dibukukan secara seragam dan dapat dengan mudah diketahui lokasi, jenis/merk type, jumlah, serta kondisinya.

Pelaksanaan inventarisasi, meliputi : pemberian nomor dan nama ruangan pada denah lokasi, pelaksanaan sensus barang sekurang-kurang sekali dalam lima

tahun, mencatat hasil inventarisasi ke dalam barang, menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI), menyampaikan laporan hasil inventarisasi, serta memperbaharui hasil inventarisasi. Kertas Kerja Inventarisasi, mengelompokan dan memberi kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi (Andiani dkk,2017).

Dari hasil *assets inventory*, dapat diketahui aktiva tetap yang benar-benar dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya Buku Induk Inventaris, Buku Inventaris, KIB, KIR. Selain itu adanya dokumen pelaporan seperti Daftar Rekapitulasi Inventaris dan Daftar Mutasi Barang (Supit dkk, 2017). Buku Induk Inventarisasi (BII) adalah merupakan gabungan/kompilasi dari Buku Inventaris. Buku Inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di tiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan. Buku Inventaris yang benar, dapat dipertanggung jawabkan dan akurat (*up to date*) maka dilakukan melalui sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun sekali. Buku Inventaris Barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan (Jamaludin, 2016).

*Assets inventory* terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas lokasi, volume atau jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset (Limbong, 2016) (Aira, 2014).

### **C. *Assets Legal Audit***

Menurut H. R. Daeng Naja berpendapat bahwa pengertian *assets legal audit* adalah suatu proses penilaian terhadap data dan fakta atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan / suatu instansi (perusahaan/organisasi) yang di audit dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan perusahaan/ suatu instansi (perusahaan/organisasi) yang diaudit, terutama dalam hal *legal risk aspect* yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/ suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (audit) mengenai opini dan saran perbaikan (Halim, 2015).

Sedangkan menurut Asman dkk (2016), *assets legal audit* juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitik beratkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klain dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan



tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surat perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Dari pengertian *legal audit* tersebut di atas dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa:

1. Suatu transaksi tentulah ada data dan fakta yang mendasarinya, yaitu suatu kesepakatan antara suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit dan pihak lainnya tentang sesuatu hal tertentu, baik di bidang dana maupun bidang kredit.
2. Data dan fakta yang diperiksa aspek yuridisnya yaitu data dan fakta yang menyangkut suatu transaksi antara suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit dan pihak ketiga, karena data dan fakta inilah yang mengandung nilai-nilai yuridis yang melahirkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, data dan fakta transaksi intern suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit tidak termasuk dalam sasaran *legal audit*.
3. Namanya suatu pemeriksaan (audit), maka di dalamnya juga terdapat suatu proses penilaian oleh legal audit terhadap suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit dengan pihak lainnya.
4. Pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh *legal auditor* tentulah dilakukan dengan tegas, dalam artian bahwa setiap kekurangan/ kelemahannya harus diungkapkan, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti oleh *auditee* (aparatur pelaksana).

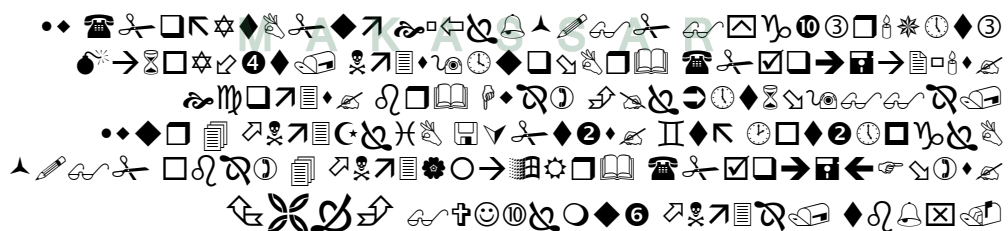
5. Penilaian yang dilakukan oleh legal *auditor* adalah tingkat keamanan suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit, terutama apabila suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit akan berperkara di pengadilan (apakah sudah cukup kuat/ sempurna bukti-bukti yang ada?)
6. Yang dimaksud dengan *legal risk aspect* adalah resiko tidak siap nya suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit untuk berperkara di pengadilan karena adanya penyimpangan/ problem yang terjadi sebagai akibat tidak dipenuhinya aspek-aspek suatu transaksi, yang [ada akhirnya akan berdampak kerugian atau membahayakan harta perusahaan.
7. *Assets legal audit* juga dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan (audit) yang berisi opini dan saran perbaikan. Opini yang disampaikan adalah opini yuridis, yaitu yang menyangkut kelemahan, kekurangan, dan cacat yuridis yang terkandung dalam suatu transaksi. Adapun saran perbaikannya adalah yang menyangkut penguatan/penyempurnaan suatu data dan fakta transaksi sebagai alat bukti secara yuridis formal.

Permasalahan suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit yang semakin hari semakin memperlihatkan kurangnya pengetahuan hukum bagi aparat pelaksana suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit, menuntut dunia suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit untuk menata diri lebih profesional disamping mampu mengantisipasi perubahan akibat arus informasi dan globalisasi.

Salah satu tujuan *legal audit* adalah mengamankan aset/harta kekayaan suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit. Dalam rangka mencapai tujuan ini *legal auditor* dengan jalan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan (audit) hukum terhadap seluruh transaksi yang dilakukan suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit dengan *stakeholders*-nya, termasuk transaksi dengan suatu institusi (perusahaan/organisasi) yang diaudit lain berupa inventarisasi status penguasaan aset, mengidentifikasi aset, serta prosedur penguasaan/pengalihan aset.
- b. Melakukan pemeriksaan (audit) apakah transaksi yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti melakukan tindakan hukum atas pelanggaran hak. (Halim, 2015).

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa begitu pentingnya mengamankan aset milik daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak penguasa yang merasa bahwa aset milik daerah itu adalah aset yang dimilikinya. Di dalam Islam dilarang untuk mengambil harta (aset) yang bukan miliknya terdapat dalam Alquran surah An-Nisa (4:29).



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan seseorang (penguasa aset) untuk mengambil harta orang lain (aset milik daerah) dengan cara batil. Etika dalam akuntansi syariah juga melarang seorang akuntan untuk mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual-beli. Oleh karena itu pentingnya legal audit dalam mengamankan aset milik daerah pada saat terjadinya transaksi agar penertiban dalam upaya pengelolaan barang milik daerah secara fisik dapat diatasi dengan mudah sesuai dengan tindakan hukum.

#### ***D. Assets Valuation***

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Penilaian BMD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD. Penetapan nilai BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Nasution dkk, 2015; Kolinung dkk, 2015; Simamora dan Halim, 2013). Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiakan ke pemerintah daerah oleh pengembang dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh (Saren dkk, 2016; Sumual dkk, 2017).

Adapun ruang lingkup penilaian aset adalah review hasil inventarisasi aset, inspeksi, dan penetapan nilai suatu kelompok aset sehingga aset tersebut mampu memenuhi kebutuhan daerah, untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat daerah (Aira, 2014).

#### ***E. Kompetensi Sumber Daya Manusia***

Kompetensi adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Kompetensi harus dilihat

sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kesuksesan ini amat mungkin dicapai bila peraturan/ kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manusia dari suatu organisasi saling berhubungan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau instansi pemerintah (Andini dkk, 2015; Harmonika, 2017). Oleh karena itu, kompetensi sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja baik di lingkup pemerintahan maupun lingkup swasta.

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya (Pangaribuan dkk, 2017). Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Ihsanti, 2014; Yendrawati, 2013). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas (Karmila dkk, 2014). Semakin seringnya seseorang mengikuti pelatihan-pelatihan maka kompetensi akan dirinya juga semakin meningkat.

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal itu diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber daya yang dimaksud SDM-nya haruslah berkualitas. Dengan kata lain, berbagai sumber daya yang melimpah ruah jika tidak diikuti dengan kompetensi SDM akan menjadi percuma

karena tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik (Sinambela, 2017; Bangun, Wilson, 2012). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dimanfaatkan sebaik mungkin guna menghasilkan kinerja yang berkualitas untuk menunjang pemerintahan yang baik.

#### ***F. Quality Of Regional Government Financial Reporting***

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Pelaporan keuangan membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik serta membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, dan keterbatasan kemampuan untuk memperoleh informasi. Dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan APBD, tiap kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan dalam proses akuntansi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan dari tiap-tiap SKPD tersebut dikonsolidasikan oleh DPPKAD menjadi LKPD (Syarifudin, 2014). LKPD tersebut akan diperiksa oleh tim periksa guna mengetahui laporan keuangan yang dihasilkan tersebut sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

[illegible]

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Mahamendengar lagi Mahamelihat.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa amanah juga termasuk yang menyangkut hak-hak Allah SWT atas hamba-hamba-Nya yang dipercayakan kepada seseorang yang berupa titipan. Titipan yang dimaksudkan dalam konteks ini berupa pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepada ahlinya.



Oleh karena itu, titipan hendaknya ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini juga memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku jabatan yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum harus menetapkan secara adil, maksudnya bahwa apabila terdapat indikasi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang mengarah pada kecurangan atau salah saji yang materiil maka pihak yang berwenang harus dapat berlaku secara adil dalam memutuskan perkara tersebut. Objektifitas para penguasa atau yang berwenang seperti hakim ini menjadi bagian penting dalam memutuskan perkara. Ketika perkara tersebut dapat diputuskan dengan pertimbangan yang matang maka keadilan dapat ditegakkan ini berarti bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barangsiapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya dihari Kiamat.

Menurut Yendrawati (2017), ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut.

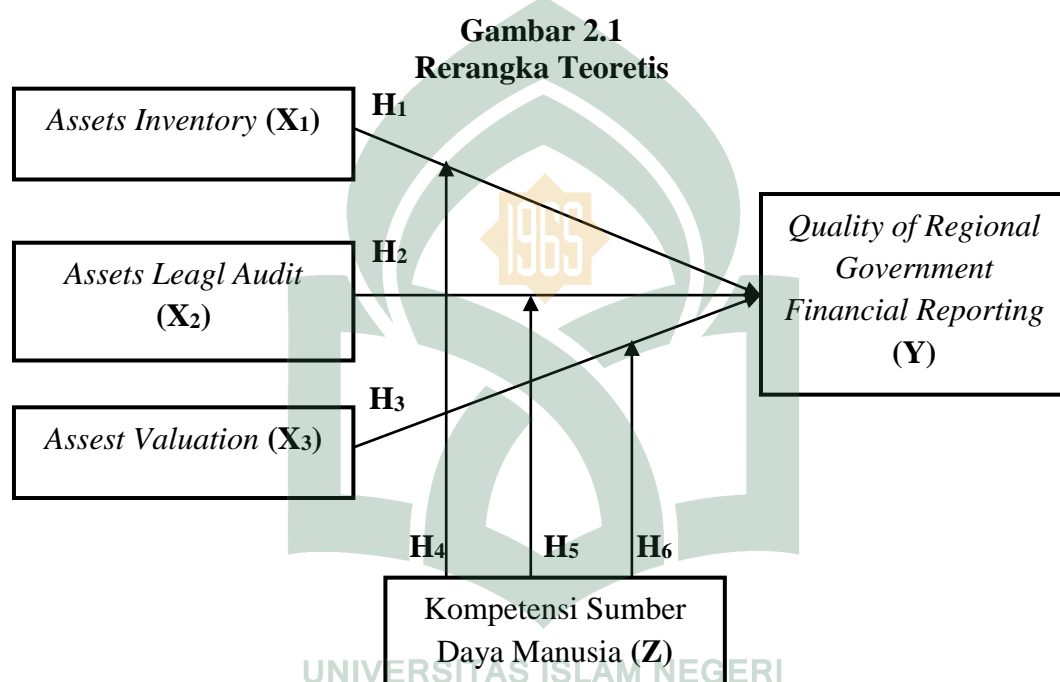
1. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai.
2. Relevan, artinya laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.
3. Materialitas, artinya suatu laporan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat

mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap.

4. Keandalan (*reliable*), artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*).
5. Penyajian jujur, artinya informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
6. Substansi mengungguli bentuk, artinya jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya.
7. Netralitas, artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.
8. Pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian.
9. Kelengkapan, artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
10. Dapat dibandingkan, artinya informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

#### **G. Rerangka Teoretis**

Berdasarkan uraian sebelumnya dan telaah pustaka, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* sebagai variabel independen dan *quality of regional government financial reporting* sebagai variabel dependen dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel perantara. Variabel yang terkait dengan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi rerangka teoretis sebagai berikut:



Sumber: Dari peneliti

Pada kerangka konseptual diatas, terdapat tiga variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel moderating. Adapun variabel independen yang terdapat pada kerangka konseptual diatas yaitu *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* yang akan diuji secara parsial terhadap variabel dependen yaitu *quality of regional government financial reporting*. Seperti terlihat dikerangka konseptual terdapat variabel moderating yaitu kompetensi sumber

daya manusia yang akan diuji apakah variabel *moderating* tersebut memoderasi hubungan variabel dependen dan independen.



### **BAB III**

#### **METEDOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, 1999). Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.
2. Lokasi penelitian ini yaitu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Daerah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari 2018.

##### ***B. Populasi dan Sampel***

1. Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2012). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Unit Kerja/SKPD dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Jeneponto yang terdiri dari 23 Unit Kerja/ SKPD yaitu Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku kuasa pengguna barang milik daerah, Penyimpanan dan Pengurus barang milik daerah serta Bagian Pelaporan Keuangan yang menyusun Laporan Keuangan Daerah.

2. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiono, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Responden yang terlibat langsung dengan kesesuaian tugas pokok dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah dan bidang akuntansi
- b) Berpengalaman dalam bidang pengelolaan barang milik daerah dengan masa kerja minimal 3 tahun
- c) Mengikuti kursus/diklat di bidang pengelolaan barang milik daerah

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

1. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner (Kurnianto, 2017).
2. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek penelitian melalui kuesioner (Kuncoro, 2013).

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survei berupa kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data

pada pengumpul data (Sugiono, 2012) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel penelitian yaitu *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation, quality of regional government financial reporting* , dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk memperoleh data yang kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden, yaitu dengan mendatangi tempat responden pada SKPD yang menjadi objek penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation, quality of regional government financial reporting* , dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengukur pendapat responden digunakan 5 skala likert. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Cukup Setuju (CS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin. Menurut Sugiono (2012), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial. Oleh sebab itu, penggunaan skala likert cocok untuk digunakan dalam penelitian ini.

#### **F. Analisis deskriptif**

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data. Uji statistik deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum untuk memperoleh deskriptif variabel dan nilai rata-rata dari frekuensi serta kategori pernyataan untuk deskriptif item pernyataan (Kuncoro, 2013).

#### **G. Uji Kualitas Data**

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu keosener atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi). Pengujian pengukuran tersebut masing-masing menunjukkan konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Pengujian validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan aplikasi IBM SPSS 21 *for windows*.

##### **1. Uji Validitas.**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid



jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai  $r$ -hitung yang menggunakan nilai dari *Corrected Item-Total Correlation*  $>$  dari  $r$ -tabel pada signifikansi 0,05 (5%) (Kuncoro, 2013).

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016: 47). Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah *one shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik, *Cronbach Alpha*. Semua konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha*  $>$  0,60 atau lebih besar daripada 0,60 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2016: 48).

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat

dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah (tidak terdapat penyimpangan) serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: 1) uji *kolmogorov smirnov* dan 2) grafik normal *probability plot*. Pada grafik normal *probability plot* data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi apabila titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal. Sedangkan untuk menguji *kolmogorof smirnov* dapat dilihat: Jika probabilitas  $> 0,05$  maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Dan apabila probabilitas  $< 0,05$  maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas (Supranto dan Abdullah, 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ , maka

dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut. Sebaliknya jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan VIF  $> 10$ , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Supranto dan Abdullah, 2017).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastiditas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada/tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Intrepetasi yang dipergunakan selain melihat grafik Scatter Plot adalah uji Park dimana pada uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Masalah heterokedastisitas tidak terjadi bila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut lebih besar dari nilai signifikasi 0,05 pada tingkat kepercayaan 5% (Supranto dan Abdullah, 2017).

### 3. Uji Hipotesis

Persamaan regresi yang diperoleh dalam suatu proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen atau tidak, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (*explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Secara sistematis diperoleh persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = *Assets Inventory*

$X_2$  = *Assets Legal Audit*

$X_3$  = *Assets Valuation*

$Y$  = *Quality of Regional Government Financial Reporting*

$b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi

$e$  = *error term*

#### b. Analisis Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Frucot dan Shearon (1991) dalam Ghazali (2016: 224) mengajukan model regresi yang agak berbeda dari dua model regresi lainnya untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari

variabel independen. Interaksi dengan pendekatan nilai selisih mutlak lebih disukai karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1 dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalkan jika nilai skor tinggi untuk variabel *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* berasosiasi dengan skor rendah kompetensi sumber daya manusia (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar. Hal ini juga akan berlaku skor rendah dari variabel *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* berasosiasi dengan skor tinggi dari kompetensi sumber daya manusia (skor rendah). Kedua kombinasi ini diharapkan akan berpengaruh terhadap *quality of regional government financial reporting*.

Langkah uji nilai selisih mutlak dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZX_3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |ZX_1 - ZM| + \beta_6 |ZX_2 - ZM| + \beta_7 |ZX_3 - ZM| + e$$

Keterangan :

$\alpha$  = Konstanta

$ZX_1$  = Standardized *Assets Inventory*

$ZX_2$  = Standardized *Assests Legal Audit*

$ZX_3$  = Standardized *Assests Valuation*

$ZM$  = Standardized Kompetensi Sumber Daya Manusia

$Y$  = *Quality of Regional Government Financial Reporting*

$|ZX - ZM|$  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX dan ZM  
Koefisien regresi

$e$  = *error term*

$\beta$  = Koefisien Regresi

Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test) :

1) Analisis koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika nilai  $R^2$  (*adjusted r square*) bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika  $R^2$  (*adjusted r square*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

2) Uji Regresi Secara Simultan

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ada dua cara untuk menguji hipotesis diterima atau ditolak, yaitu:

- a) Membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel
- b) (1) Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
- (2) Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c) Melihat *Probabilities Values*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan  $\alpha = 0,05$ :

- (1) Jika probabilitas  $>$  0,05, maka hipotesis ditolak
- (2) Jika probabilitas  $<$  0,05, maka hipotesis diterima

3) Uji Regresi Secara Parsial

Uji  $t$  digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen ( $X$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Dalam penelitian ini uji  $t$  digunakan untuk menguji regresi berganda dan regresi moderating. Ada dua cara untuk menguji hipotesis diterima atau tidak, yaitu:

- a) Membandingkan  $t$  hitung dengan  $t$  tabel
- (1) Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

- (2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) Melihat *probabilities Value*

Berdasarkan nilai probabilitas dengan  $\alpha = 0,05$ :

- (1) Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka hipotesis ditolak
- (2) Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka hipotesis diterima
- (3) Hasil penelitian harus sesuai dengan arah hipotesis yaitu positif atau negatif. Walaupun hasil penelitian signifikan namun tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif), maka hipotesis ditolak





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Objek Penelitian*

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto**

###### **a. Selayang Pandang**

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Jeneponto.

Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah Bangsa, Negara, dan Daerah. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya yang melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar-seminar yang dilaksanakan secara terpadu.

Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia,

sosio-kultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang teguh, dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan. Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya, serta pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di atas yaitu:

**Pertama:**

November 1863, adalah tahun berpisahannya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda.

Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat “Todo” sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat.

Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

**Kedua:**

Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh “Toddo Appaka” sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea.

Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu.

Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian, penetapan Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari Jadi Kabupaten Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

*Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003.*

### **b. Letak Geografis**

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang  $\pm 95$  di bagian selatan. Secara geografis terletak diantara  $50^{\circ} 16' 13'' - 50^{\circ} 39' 35''$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ} 40' 19'' - 120^{\circ} 7' 51''$  Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan: Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah Tegal/Kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah Sawah Panen Satu Kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah Hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk Pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah Ladang/ Huma seluas 31 ha atau 0,04%.

### **c. Topografi**

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat bahwa pada bagian Utara terdiri dari daratan tinggi dan bukti-bukti yang membentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan

1.400 meter diatas permukaan laut. Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran.

Dibagian tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Daerah ini nilai ekonominya cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai area pengembangan industri penggaraman dan daerah ini telah tumbuh usaha penggaraman rakyat.

### **1) Tanah dan Geologi**

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu:

#### **a) Jenis Tanah Alluvial**

Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala dan Alluvial Coklat Kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalate.

#### **b) Jenis Tanah Gromosal**

Jenis tanah gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalate

dan Batang. Gromosal Hitam terdapat di Kecamatan Tamalate, Binamu dan Batang.

c) Jenis Tanah Mediteren

Jenis tanah mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang dan Kelara. Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara.

d) Jenis Tanah Lotosal

Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Kelara.

e) Jenis Tanah Andosil

Jenis tanah Andosil Kelabu terdapat di Kecamatan Kelara.

f) Jenis Tanah Regional

Jenis tanah Regonal Coklat terdapat dilima kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, maka pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariasi dibanding dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, tambah/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain.

## 2) Musim

Keadaan musim di kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan Novemberr sampai dengan bulan April. Adapun musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.

## 3) Curah Hujan

Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan yang tertinggi terjadi pada tahun 1999 yang jatuh pada bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau kering terjadi pada bulan Juni, Agustus, September, dan Oktober.

## 4) Iklim

Ditinjau dari klarifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara berurutan berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah sekitar 1-3 bulan.
- b. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab berkisar 2-4 bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 700-1.727 m diatas permukaan laut yakni pada wilayah kecamatan Kelara.

#### d. Visi dan Misi

##### 1. VISI

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah, dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat diyakini sebagai pengaruh dalam pelaksanaan aktivitas tujuan organisasi. Visi Kabupaten Jeneponto yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Penataan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang Sejahtera”**.

##### 2. Misi

Organisasi yang dibentuk selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya ditetapkan misi yang merupakan pernyataan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai organisasi yang bersangkutan. Misi yang ditetapkan ini menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan organisasinya. Penetapan misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan guna mengarahkan operasional kegiatan menuju sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui strategi yang telah dipilih.

Mengacu pada visi yang telah ditetapkan, Kabupaten Jeneponto menjabarkan ke dalam misi yang harus dilaksanakan yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran organisasi yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Jeneponto telah merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik



2. Meningkatkan kwalitaas sumber daya manusia
3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat
4. Meninjau tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel
5. Mewujudkan pembangunan infrasrtuktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan
6. Meningkatkan kualitas beragama

**e. Fungsi Satuan Perangkat Daerah**

Setiap Daerah, Kabupaten atau Kota dibentuk Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan, Perangkat Daerah ini juga disebut dengan unit-unit kerja. SKPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab baik kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan juga lembaga teknis daerah serta kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna

anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja, sedangkan laporan keuangan yang harus setiap unit kerja adalah laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **f. Daftar Dinas**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan 24 September 2018. Selama proses penelitian data yang diperoleh dan yang dapat diolah oleh peneliti hanya 10 SKPD. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kendala, diantaranya: terbatasnya waktu penelitian, masalah perizinan, responden yang sibuk, jarak yang cukup jauh, dan adanya aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa setempat serta pelaksanaan hari Kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus. Berikut daftar 10 SKPD Kabupaten Jeneponto:

##### **1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Jl. Lingkar No. 30 Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

##### **2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. Lingkar, Empang Sel., Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

##### **3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Jl. Pelita Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Jl. Pelita Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

5) Dinas Kesehatan

Jl. Pelita Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. Pahlawan No. 12 Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 34, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

8) Dinas Pariwisata

Jl. Pelita No. 60 Bontosunggu, Empoang Sel., Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

9) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jl. Pelita Empoang, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

10) Dinas Pertanian

Jl. Balang Toa, Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

**B. Hasil Penelitian**

**1. Karakteristik Responden**

Adapun jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 40 kuesioner dengan pembagian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang disebarkan	40	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	5	12,5%
3	Kuesioner yang kembali	35	87,5%
4	Kuesioner yang cacat	0	0
5	Kuesioner yang dapat diolah	35	87,5%
<b>n sampel = 35</b> <b>Responden Rate = <math>(35/40) \times 100\% = 87,5\%</math></b>			

*Sumber: Data primer yang diolah (2018)*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan berjumlah 40 eksemplar dan jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah adalah sebanyak 35 eksemplar atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 87,5% dari total yang disebarkan. Adapun kuesioner yang tidak kembali adalah 5 eksemplar atau tingkat yang diperoleh sebesar 12,5%. Kuesioner sebanyak 5 eksemplar yang tidak kembali disebabkan karena adanya kesibukan para responden yang terdapat di beberapa SKPD Kabupaten Jeneponto dan tidak sengaja menghilangkan kuesioner tersebut. Sedangkan kuesioner yang cacat atau tidak dapat diolah tidak ada.

Terdapat 4 (empat) karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja pada SKPD Kabupaten Jeneponto. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

a. Usia

Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan usia responden mulai dari usia <25 tahun hingga usia >40 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1	<25 Tahun	2	5,71%
2	26-30 Tahun	5	14,29%
3	31-35 Tahun	11	31,43%
4	36-40 Tahun	5	14,29%
4	>40 Tahun	12	34,29%
Jumlah		35	100%

Sumber: Data Primer diolah (2018)

Tabel 4.2 menunjukkan usia responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara lebih dari 40 tahun yaitu sebanyak 12 responden atau sebesar 34,29%, usia kurang dari 25 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 5,71%, dilanjutkan dengan usia antara 26-30 tahun sebanyak 5 responden atau sebesar 14,29%, usia antara 31-35 tahun sebanyak 11 responden atau sebesar 31,43%, dan usia antara 36-40 sebanyak 5 responden atau sebesar 14,29%. Usia berkaitan erat dengan tingkat kedewasaan atau maturitas seseorang, bahwa semakin tinggi usia seseorang maka tingkat kedewasaan teknis dan psikologisnya juga akan semakin tinggi (Worung dkk, 2015). Oleh karena itu, pegawai di setiap SKPD Kabupaten Jeneponoto dalam mengelola aset milik daerah memiliki tingkat kedewasaan teknis dan psikologis yang baik. Hal ini terlihat dari hasil uji data yang menunjukkan bahwa usia >40 tahun merupakan usia tertinggi dengan jumlah responden sebesar 12 responden.

b. Jenis Kelamin

Karakteristik responden pada penelitian ini salah satunya adalah jenis kelamin. Pada penelitian ini terdapat 35 responden dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Berikut adalah rincian karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	13	37,14%
2	Perempuan	22	62,86%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang atau sebesar 62,86% sedangkan sisanya yakni 13 orang atau sebesar 37,14% yang merupakan jenis kelamin laki-laki. Hal ini juga menunjukkan bahwa SKPD Kabupaten Jeneponto didominasi oleh pegawai perempuan khususnya bagian aset daerah.

c. Tingkat Pendidikan

Penelitian ini juga memuat data responden berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam mengelola hasil penelitian. Adapun rincian dari tingkat pendidikan responden pada penelitian ini, sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA/ Sederajat	1	2,86%
2	D3	1	2,86%
4	S1	20	57,14%
5	S2	13	37,14%
6	S3	0	0,00%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak 20 responden atau sebesar 57,14%, sedangkan dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 13 responden atau sebesar 37,14%, responden dengan tingkat pendidikan D3 dan SLTA/Sederajat masing –masing sebanyak 1 responden atau sebesar 2,86%.

Pegawai yang berada pada tingkat pendidikan strata yang lebih tinggi akan mampu menjaga dan memahami etika secara mendasar. Para pegawai dengan tingkat pendidikan yang tinggi juga mempunyai peluang berkinerja yang baik. (Worung dkk, 2015). Terlihat dari hasil olah data di atas bahwa para pegawai di beberapa SKPD Kabupaten Jeneponto khususnya bagian keuangan dan aset sebagian besar memiliki latar belakang yang didominasi pada lulusan strata 1 (S1), yang mampu mengelola aset milik daerah dengan baik.

#### d. Masa Kerja

Masa kerja merupakan salah satu karakteristik penting yang dibutuhkan oleh peneliti. Masa kerja menjadi kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini. Pengalaman seseorang melaksanakan pekerjaan terlihat dari lamanya ia bekerja

yang selalu berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Informasi mengenai data responden berdasarkan masa kerja diuraikan pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

No.	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	1-2 tahun	2	5,71%
2	3-5 tahun	4	11,43%
4	5-10 tahun	9	25,71%
5	10-15 tahun	10	28,57%
6	15-20 tahun	7	20,00%
7	≥20 tahun	3	8,57%
Jumlah		35	100%

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Tabel 4.5 menunjukkan tingkat masa kerja responden yang paling banyak berada pada 10 hingga 15 tahun yaitu sebanyak 10 responden atau sebesar 28,57%. Masa kerja 5 hingga 10 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 25,71%, masa kerja 15 hingga 20 tahun sebanyak 7 responden atau sebesar 20,00%, masa kerja 3 hingga 5 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 11,43%, sedangkan masa kerja lebih dari 20 tahun sebanyak 3 responden atau sebesar 8,57%, serta masa kerja 1 hingga 2 tahun sebanyak 2 responden atau sebesar 5,71%. Tingginya jumlah pegawai di SKPD Kabupaten Jeneponto dengan masa 10-15 tahun yang menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola aset milik daerah karena semakin lama seseorang berkarya dalam suatu organisasi maka akan semakin tinggi tingkat produktivitasnya.

## **2. Analisis Deskriptif Variabel**

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi data yang digunakan dalam penelitian.



**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif Variabel**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Assets Inventory</i>	35	18	25	21,40	2,089
<i>Assest Legal Audit</i>	35	22	35	27,65	3,803
<i>Assets Valuation</i>	35	7	15	11,71	1,741
Kompetensi SDM	35	23	40	30,40	3,599
<i>Quality of Regional Government Financial Reporting</i>	35	34	55	45,08	4,293
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Tabel 4.6 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis regresi dengan menggunakan statistik deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 35 responden. Variabel *assets inventory* menunjukkan nilai minimum sebesar 18 yang terdapat pada item pernyataan ketiga, nilai maksimum sebesar 25 yang terdapat pada item pernyataan pertama dan keempat, mean (rata-rata) sebesar 21,40 dengan standar deviasi sebesar 2,089. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel *assets legal audit* menunjukkan nilai minimum sebesar 22 yang terdapat pada item pernyataan kelima, nilai maksimum sebesar 35 yang terdapat pada item pernyataan kedua, mean (rata-rata) sebesar 27,65 dengan standar deviasi sebesar 3,803. Variabel *assets valuation* menunjukkan nilai minimum sebesar 7 yang terdapat pada item pernyataan pertama, nilai maksimum sebesar 15 yang terdapat pada item pernyataan kedua, mean (rata-rata) sebesar 11,71 dengan standar deviasi sebesar 1,741.

Kompetensi sumber daya manusia menunjukkan nilai minimum sebesar 23 yang terdapat pada item pernyataan pertama, nilai maksimum sebesar 40 yang terdapat pada item pernyataan kedelapan, mean (rata-rata) sebesar 30,40 dengan

standar deviasi sebesar 3,599. Selanjutnya variabel *quality of regional government financial reporting* menunjukkan nilai minimum sebesar 34 yang terdapat pada item pernyataan ketujuh, nilai maksimum sebesar 55, mean (rata-rata) sebesar 45,08 dengan standar deviasi sebesar 4,293.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel *quality of regional government financial reporting* yaitu 45,08, sedangkan yang terendah adalah variabel *assets valuation* yakni 11,71. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel *of regional government financial reporting* sebesar 4,293 dan yang terendah berada pada variabel *assets valuation* sebesar 1,741.

**a. Analisis Deskriptif Variabel *Assets Inventory* (X1)**

Analisis deskriptif terhadap variabel *assets inventory* terdiri dari 5 item pernyataan. Hasil jawaban responden mengenai *assets inventory* akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel *Assets Inventory***

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Mean
		STS	TS	CS	S	SS		
Bobot		1	2	3	4	5		
X1.1	F			3	16	16	35	4,37
	Skor			9	64	80	153	
	%			0	0	0	1	
X1.2	F			2	21	12	35	4,29
	Skor			6	84	60	150	
	%			0	1	0	1	
X1.3	F			6	16	13	35	4,2
	Skor			18	64	65	147	
	%			0	0	0	1	
X1.4	F			1	20	14	35	4,37
	Skor			3	80	70	153	
	%			0	1	0	1	
X1.5	F			4	21	10	35	4,17
	Skor			12	84	50	146	
	%			0	1	0	1	
Rata-rata Keseluruhan								4,28

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *assets inventory* (X1) berada pada skor 4,28. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap *assets inventory*. Pada variabel *assets inventory*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,37 yaitu berada pada item pernyataan pertama dan keempat. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Penyimpanan dan Pengurus Barang, dan Bagian Pelaporan Keuangan sebagian besar berpendapat bahwa mereka memahami cara melakukan pengelolaan aset terutama dalam hal inventarisasi aset. Ini terlihat dari adanya pelaksanaan pembukuan atau

pelaksanaan penatausahaan aset milik daerah yang telah melakukan pengelompokan aset milik daerah yang terdiri dari lokasi, jenis/merek/type, jumlah, serta kondisi aset tersebut. Oleh karena itu, dapat diketahui dengan mudah aset yang benar-benar dimiliki oleh pemerintah serta meminimalkan pelalahgunaan aset yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

**b. Analisis Deskriptif Variabel *Assets Legal Audit* (X2)**

Analisis deskriptif terhadap variabel *assets legal audit* terdiri dari 11 item pernyataan yang dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *assets legal audit*. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 4.8**  
**Deskriptif Item Pertanyaan Variabel *Assets Legal Audit***

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Mean
		STS	TS	CS	S	SS		
Bobot		1	2	3	4	5		
X2.1	F			6	23	6	35	4,00
	Skor			18	92	30	140	
	%			171	66	0	100	
X2.2	F			5	16	14	35	4,26
	Skor			15	64	70	149	
	%			0	0	0	100	
X2.3	F		3	4	20	8	35	3,94
	Skor		6	12	80	40	138	
	%		8,6	11	57	23	100	
X2.4	F		1	6	22	6	35	3,94
	Skor		2	18	88	30	138	
	%		3	17	63	17	100	
X2.5	F		6	7	17	5	35	3,6
	Skor		12	21	68	25	126	
	%		17	20	48,6	14	100	
X2.6	F			10	15	10	35	4,00
	Skor			30	60	50	140	
	%			29	43	29	100	
X2.7	F			8	22	5	35	3,91
	Skor			24	88	25	137	
	%			22,90	62,90	14,30	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,95

Sumber: Data primer diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *assets legal audit* (X2) berada pada skor 3,95. Hal ini berarti variabel *assets legal audit* memberikan persepsi yang cukup baik terhadap *assets legal audit*. Pada variabel *assets legal audit*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,26 yaitu berada pada item pernyataan kedua. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Penyimpanan

dan Pengurus Barang, dan Bagian Pelaporan Keuangan sebagian besar berpendapat bahwa adanya legal audit aset dapat membantu mengamankan aset milik daerah, sehingga aset tersebut dapat dipergunakan secara optimal serta mengurangi resiko dari penyerobotan pengambil alihan atau klain dari pihak lain terhadap aset milik daerah di Kabupaten Jeneponto.

**c. Analisis Deskriptif Variabel *Assets Valuation* (X3)**

Analisis deskriptif terhadap variabel *assets valuation* (X3) terdiri dari 3 item pernyataan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *assets valuation*. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel *Assets Valuation***

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Mean
		STS	TS	CS	S	SS		
Bobot			2	3	4	5		
X3.1	F		3	7	20	5	35	3,46
	Skor		6	21	80	25	132	
	%		8,6	20,0	57,1	14,3	100	
X3.2	F			6	22	7	35	4,03
	Skor			18	88	35	141	
	%			17,1	62,9	20,0	100	
X3.3	F		1	8	19	7	35	3,91
	Skor		2	24	76	35	137	
	%		2,9	22,9	54,3	20,0	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,80

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 35 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *assets valuation* (X3) berada pada skor 3,80. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap *assets valuation*. Pada variabel *assets valuation*, terlihat nilai indeks tertinggi sebesar 4,03 yaitu berada

pada item pernyataan kedua. Responden terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Penyimpanan dan Pengurus Barang, dan Bagian Pelaporan Keuangan sebagian besar berpendapat bahwa dengan adanya penetapan nilai suatu kelompok aset milik daerah Kabupaten Jeneponto tersebut maka akan mampu memenuhi kebutuhan daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat daerah Kabupaten Jeneponto.

**d. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (M)**

Analisis deskriptif terhadap variabel kualitas sumber daya manusia terdiri dari 8 item pernyataan. Hasil pernyataan responden mengenai kualitas sumber daya manusia akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 4.10**  
**Deskriptif Item Pernyataan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Mean
		STS	TS	CS	S	SS		
Bobot		1	2	3	4	5	Total	Mean
M1	F	1	2	14	16	2	35	3,46
	Skor	1	4	42	64	10	121	
	%	2,9	5,7	40,0	45,7	5,7	100	
M2	F			17	14	4	35	3,63
	Skor			51	56	20	127	
	%			48,6	40,0	11,4	100	
M3	F			18	9	8	35	3,71
	Skor			54	36	40	130	
	%		8,6	11,4	57,1	22,9	100	
M4	F		1	8	18	8	35	3,94
	Skor		2	24	72	40	138	
	%		2,9	22,9	51,4	22,9	100	
M5	F		1	9	18	7	35	3,89
	Skor		2	27	72	35	136	
	%		2,9	25,7	51,4	20,0	100	
M6	F		2	9	22	2	35	3,69
	Skor		4	27	88	10	125	
	%		5,7	25,7	62,9	5,7	100	
M7	F			5	25	5	35	3,91
	Skor			15	100	25	140	
	%			14	71	14	100	
M8	F			7	18	10	35	4,09
	Skor			21	72	50	143	
	%			20,0	51,4	28,6	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,79

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel kompetensi sumber daya manusia (M) berada pada skor 3,79. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap kompetensi sumber daya manusia. Pada variabel kompetensi sumber



daya manusia, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,09 yaitu berada pada item pernyataan kedelapan. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Penyimpanan dan Pengurus Barang, dan Bagian Pelaporan Keuangan sebagian besar berpendapat bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja di lingkup pemerintahan, tidak hanya dari segi pelayanan namun juga dari segi penyusunan laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang kompeten akan mampu mengelola aset daerah secara baik sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto. Ini terlihat dari adanya pelatihan yang diikuti oleh beberapa pegawai yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Jeneponto.

**e) Analisis Deskriptif Variabel *Quality of Regional Government Financial Reporting* (Y)**

Analisis deskriptif terhadap variabel *quality of regional government financial reporting* terdiri dari 11 item pernyataan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *quality of regional government financial reporting*. Sumber, data primer yang diolah (2018). Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Deskriptif Item Pernyataan Variabel *Quality of Regional Government***  
***Financial Reporting***

Item Pernyataan		Frekuensi dan Persentase					Total	Mean
		STS	TS	CS	S	SS		
Bobot		1	2	3	4	5		
Y1	F			3	23	9	35	4,17
	Skor			9	92	45	146	
	%			8,6	65,7	25,7	100	
Y2	F			1	21	13	35	4,34
	Skor			3	84	65	152	
	%			2,9	60,0	37,1	100	
Y3	F			3	22	10	35	4,2
	Skor			9	88	50	147	
	%			8,6	62,9	28,6	100	
Y4	F			3	26	6	35	4,09
	Skor			9	104	30	143	
	%			8,6	74,3	17,1	100	
Y5	F			2	10	23	35	4,6
	Skor			6	40	115	161	
	%			5,7	28,6	65,7	100	
Y6	F			6	19	10	35	4,11
	Skor			18	76	50	144	
	%			17,1	54,3	28,6	100	
Y7	F		3	11	18	3	35	3,60
	Skor		6	33	72	15	126	
	%		8,6	31,4	51,4	8,6	100	
Y8	F		3	8	22	2	35	3,66
	Skor		6	24	88	10	128	
	%		8,6	22,9	62,9	5,7	100,0	
Y9	F		1	3	24	7	35	4,06
	Skor1		2	9	96	35	142	
	%		2,9	8,6	68,6	20,0	100,0	
Y10	F			5	22	8	35	4,09
	Skor			15	88	40	143	
	%			14,3	62,9	22,9	100,0	
Y11	F			5	19	11	35	4,17
	Skor			15	76	55	146	
	%			14,3	54,3	31,4	100,0	
Rata-rata Keseluruhan								4,10

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 35 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel *quality of regional government financial reporting* (Y) berada pada skor 4,10. Hal ini berarti bahwa responden memberikan persepsi yang cukup baik terhadap *quality of regional government financial reporting*. Pada variabel *quality of regional government financial reporting*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,34 yaitu berada pada item pernyataan kedua. Responden yang terdiri dari Kepala SKPD, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Penyimpanan dan Pengurus Barang, dan Bagian Pelaporan Keuangan sebagian besar memahami bahwa pengelolaan aset yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto yang baik juga sebagai dasar untuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka akan tertata juga aset yang dimiliki pemerintah daerah sehingga terhindar dari penyalahgunaan aset.

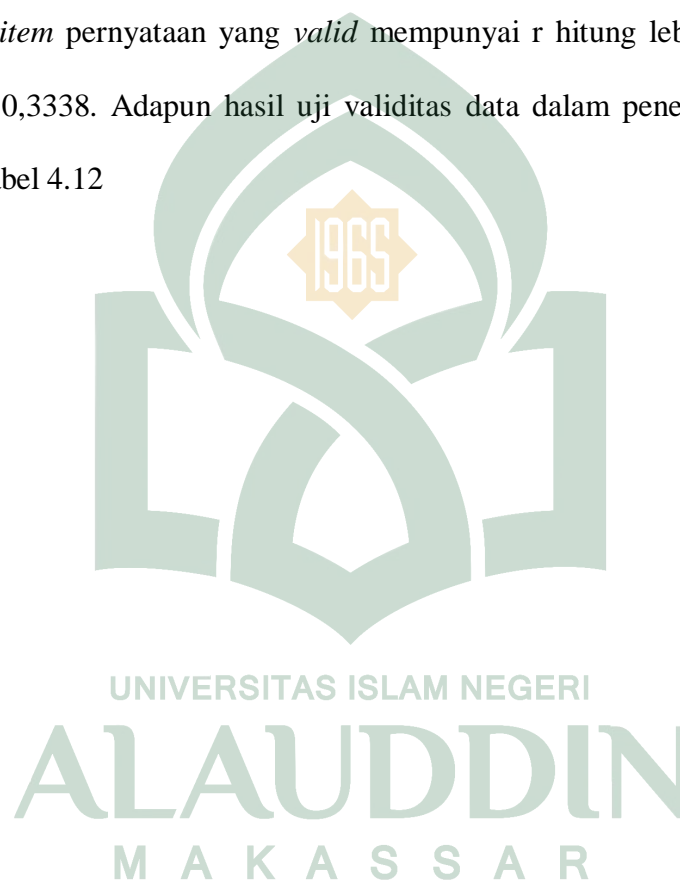
### C. Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat di analisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian *valid* atau tidak. Kuesioner dapat

dikatakan *valid* jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui *item* pernyataan itu *valid* dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation*. Apabila *item* pernyataan mempunyai nilai  $r$  hitung  $>$  dari nilai tabel  $r$  maka dapat dikatakan *valid*. Pada penelitian ini terdapat jumlah  $(n) = 35$  responden dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $35-2 = 33$  dan  $\alpha = 0,05$  didapat nilai  $r$  tabel = 0,3338. Jadi, *item* pernyataan yang *valid* mempunyai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel sebesar 0,3338. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.12



**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Validasi**

<b>Variabel</b>	<b>Item</b>	<b>R Hitung</b>	<b>Tabel r</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Assets Inventory</i>	X1.1	0,65	0,3338	Valid
	X1.2	0,615		Valid
	X1.3	0,689		Valid
	X1.4	0,613		Valid
	X1.5	0,789		Valid
<i>Assets Legal Audit</i>	X2.1	0,664	0,3338	Valid
	X2.2	0,741		Valid
	X2.3	0,713		Valid
	X2.4	0,716		Valid
	X2.5	0,746		Valid
	X2.6	0,847		Valid
	X2.7	0,732		Valid
<i>Assets Valuation</i>	X3.1	0,81	0,3338	Valid
	X3.2	0,828		Valid
	X3.3	0,777		Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	M1	0,686	0,3338	Valid
	M2	0,713		Valid
	M3	0,773		Valid
	M4	0,703		Valid
	M5	0,686		Valid
	M6	0,44		Valid
	M7	0,407		Valid
	M8	0,475		Valid
<i>Quality of Regional Government Financial Reporting</i>	Y1	0,633	0,3338	Valid
	Y2	0,495		Valid
	Y3	0,427		Valid
	Y4	0,740		Valid
	Y5	0,660		Valid
	Y6	0,787		Valid
	Y7	0,612		Valid
	Y8	0,463		Valid
	Y9	0,598		Valid
	Y10	0,590		Valid
	Y11	0,841		Valid

*Sumber: Data primer diolah (2018)*

Tabel 4.12 tersebut memperhatikan bahwa seluruh item pernyataan dari variabel yang diteliti telah memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar daripada nilai  $r$  tabel sebesar 0,3338. Hal ini berarti bahwa item-item pernyataan kuesioner yang diperoleh telah *valid* dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

## 2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yaitu suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	<i>Assets Inventory</i>	0,694	Reliabel
2	<i>Assets Legal Audit</i>	0,855	Reliabel
3	<i>Assets Valuation</i>	0,716	Reliabel
4	<i>Kompetensi Sumber Daya Manusia</i>	0,770	Reliabel
5	<i>Quality of Regional Government Financial Reporting</i>	0,800	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (2018)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel *assets inventory*, *assets legal audit*,

*assets valuation*, kompetensi sumber daya manusia, dan *quality of regional government financial reporting* dapat dikatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

#### **D. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik harus terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Hal ini bertujuan agar dapat melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multioloneritas dan uji heteroskedasitas.

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan agar dapat melihat variabel-variabel yang digunakan untuk menguji hipotesis telah terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu *kolmogorov smirnov* dan *normal probability plot*. Uji *kolmogorov smirnov* lebih sering digunakan karena menghasilkan angka-angka yang lebih detail dan hasilnya dapat dipercaya. Suatu persamaan refresi dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitas *kolmogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil uji *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut:

**Tabel 4.14**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,63546582
	Absolute	,102
Most Extreme Differences	Positive	,069
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		,601
Asymp. Sig. (2-tailed)		,863

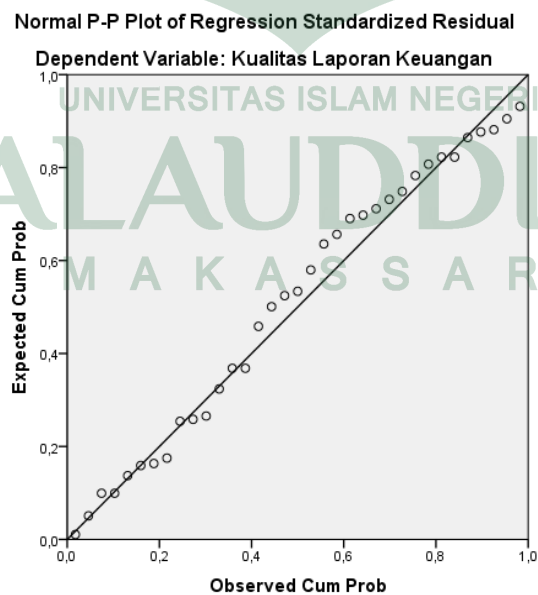
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Dari tabel 4.14 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang ditunjukkan dengan *asymp sig* (2 tailed) berada diatas 0,05 yaitu sebesar 0,863. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal. Selain uji *Kolmogorov smirnov* cara lain untuk menguji normalitas yaitu dengan grafik normal *probability plot*.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas – Normal Probability Plot**



Sumber: Output SPSS 21 (2018)



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal *probability plot* mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normal.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengikuti apakah model regresi ditemukan korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antar variabel independen. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF), sebagai berikut:

- Jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  dan *VIF*  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.
- Jika nilai *tolerance*  $< 0,10$  dan *VIF*  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolonieritas.

**Table 4.15**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Assets Inventory	,597	1,676
	Assets Legal Audit	,518	1,930
	Assets Valuation	,670	1,494
	Kompetensi SDM	,699	1,431

a. Dependent Variable: *Quality of Regional Government Financial Reporting*  
Sumber: Output SPSS 21 (2018)

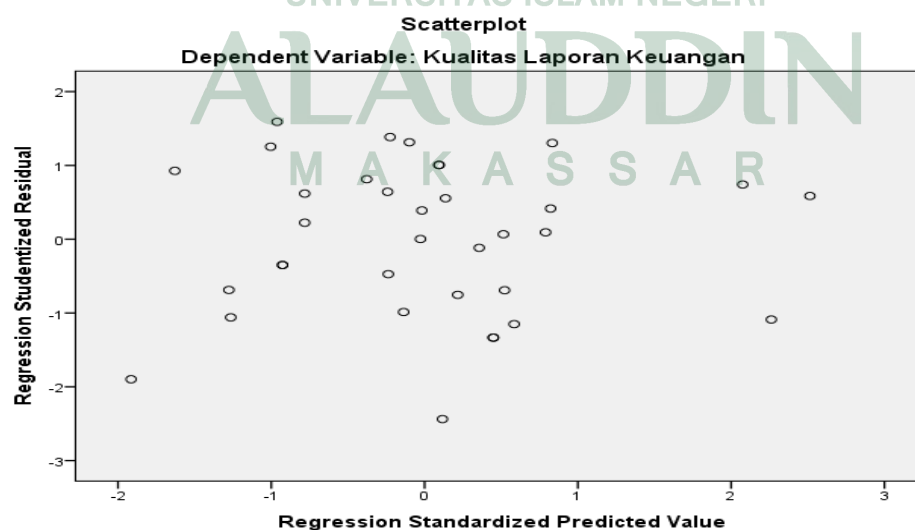
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.15 diatas, nilai *tolerance* yang menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Di mana variabel *assets inventory* senilai 0,597, *assets legal audit* senilai 0,518, *assets valuation* senilai 0,670, dan kompetensi sumber daya manusia senilai 0,699. Keempat variabel independen dan

variabel moderasi dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* di atas 0,10 yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama dapat dilihat nilai VIF untuk keempat variabel independen dan variabel moderasi menunjukkan nilai lebih kecil daripada 10 (*assets inventory* senilai 1,676, *assets legal audit* senilai 1,930, *assets valuation* senilai 1,494, dan kompetensi sumber daya manusia senilai 1,431). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas anatar variabel.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *scatter plot*. Apabila tidak terdapat pola yang teratur, maka model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *scatter plot* diperoleh sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas – Grafik *Scatterplot***



*Sumber: Output SPSS (2018)*

Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi *quality of regional government financial reporting* berdasarkan *assets inventory*, *assets legal audit*, *assets valuation*, dan kompetensi sumber daya manusia.

Uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan uji Park. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam tabel 4.16. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Park**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,178	5,278		1,171	,251
<i>Assets Inventory</i>	-,013	,270	-,010	-,047	,962
<i>Assets Legal Audit</i>	,119	,159	,177	,746	,461
<i>Assets Valuation</i>	-,025	,306	-,017	-,082	,935
Kompetensi SDM	-,266	,145	-,376	-1,838	,076

a. Dependent Variable: *Quality of Regional Government Financial Reporting*

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji park pada tabel 4.16 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas semua variabel independen dan variabel moderasi berada diatas

tingkat signifikan 0,05, jadi data dalam penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

#### **E. Hasil Uji Hipotesis**

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  menggunakan analisis regresi berganda dengan mengresikan variabel independen (*assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation*) terhadap variabel dependen (*quality of regional government financial reporting*), sedangkan untuk hipotesis  $H_4$ ,  $H_5$ , dan  $H_6$  untuk menguji pengaruh moderasi kompetensi sumber daya manusia dengan menggunakan analisis regresi moderasi melalui pendekatan uji interaksi atau selisih mutlak. Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

##### **1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian $H_1$ , $H_2$ , $H_3$**

Pengujian hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$  dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk menguji apakah *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

##### **a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil dari uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 <sup>a</sup>	,613	,576	2,79625

a. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Asssets Legal Audit*, *Assets Valuation*  
 Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.17 menunjukkan nilai *adjusted r square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.17 tersebut, nilai *adjust r square* sebesar 0,576, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 57,6% *quality of regional government financial reporting* dipengaruhi oleh variabel *assets inventory*, *asssets legal audit*, dan *assets valuation* sebesar 0,424 atau 42,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **b. Uji F – Uji Simultan**

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang ada dalam model memiliki pengaruh yang secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji F yaitu:

- Jika nilai F-hitung > F-tabel dan nilai signifikan < 0,05, maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- Jika nilai F-hitung < F-tabel dan nilai signifikan > 0,05, maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut hasil dari uji Simultan (F) yang dapat dilihat dari tabel 4.18 di bawah ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil uji f- Uji Simultan**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	384,353	3	128,118	16,385	,000 <sup>b</sup>
	Residual	242,390	31	7,819		
	Total	626,743	34			

a. Dependent Variable: *Quality of Regional Government Financial Reporting*

b. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 16,385 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, di mana nilai F hitung (16,385) lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,91 ( $df_1 = 4-1=3$  dan  $df_2 = 35-4=31$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti variabel *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation*.

#### c. Uji t (Uji Parsial)

Uji ini dilakukan untuk melihat sejauhmana pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Hipotesis pada uji t ini yaitu  $H_0$ = tidak berpengaruh signifikan dan  $H_1$ = berpengaruh signifikan. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji t yaitu:

- $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika nilai t-hitung < dari t-tabel atau jika nilai signifikan > 0,05.

- $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika nilai t-hitung > dari t-tabel atau jika nilai signifikan < 0,05.

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji t – Uji Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11,426	5,205		2,195	,036
<i>Assets Inventory</i>	,641	,296	,312	2,163	,038
<i>Assets Legal Audit</i>	,356	,170	,316	2,093	,045
<i>Assets Valuation</i>	,861	,308	,349	2,800	,009

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*  
Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.19 di atas dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 11,426 + 0,641 X_1 + 0,356 X_2 + 0,861 X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Pada model regresi tersebut memiliki konstanta sebesar 11,426, hal ini berarti bahwa jika variabel independen (*assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation*) diasumsikan sama dengan nol, maka *quality of regional government financial reporting* akan meningkat sebesar 11,426.
- Nilai koefisien regresi variabel *assets inventory* ( $X_1$ ) sebesar 0,641 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets inventory* ( $X_1$ ) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,641.
- Nilai koefisien regresi variabel *assets legal audit* ( $X_2$ ) sebesar 0,356 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets legal audit* ( $X_2$ )

mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,356.

- d. Nilai koefisien regresi variabel *assets valuation* ( $X_3$ ) sebesar 0,861 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets valuation* ( $X_3$ ) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,861.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) *Assets Inventory* terhadap *quality of regional government financial reporting* ( $H_1$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel *assets inventory* memiliki nilai t hitung sebesar 2,163 > nilai tabel t sebesar 2,0395 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df=n-k$ , yaitu  $35-4=31$ ) dengan *understandardized coefficients* beta sebesar 0,641 dan tingkat signifikansi 0,038 yang lebih kecil dari 0,050, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *assets inventory* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting* terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik *assets inventory* dalam pengelolaan aset milik daerah, maka *quality of regional government financial reporting* (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) juga akan semakin membaik.

- 2) *Assets Legal Audit* terhadap *quality of regional government financial reporting* ( $H_2$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel *assets legal audit* memiliki nilai t hitung sebesar 2,093 > nilai t tabel sebesar 2,0395 (sig.  $\alpha=0,05$



dan  $df=n-k$ , yaitu  $35-4=31$ ) dengan *understandardized coefficients* beta sebesar 0,356 dan tingkat signifikansi 0,045 yang lebih kecil dari 0,050, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan *assets legal audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting* terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik *assets legal audit* dalam pengelolaan aset daerah, maka *quality of regional government financial reporting* juga akan semakin baik.

3) *Assets Valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting* ( $H_3$ )

Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa variabel *assets valuation* memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 2,800 > nilai  $t$  tabel sebesar 2,03951 (sig.  $\alpha=0,05$  dan  $df=n-k$ , yaitu  $35-4=31$ ) dengan *understandardized coefficients* beta sebesar 0,861 dan tingkat signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 0,050, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan *assets valuation* berpengaruh dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting* terbukti atau dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik *assets valuation* dalam pengelolaan aset milik daerah, maka *quality of regional government financial reporting* juga semakin baik.

2. **Hasil Uji Regresi Moderasi dengan Pendekatan Selisih Mutlak terhadap Hipotesis Penelitian  $H_4$ ,  $H_5$ ,  $H_6$**

Penguji nilai selisih mutlak dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating terhadap hubungan *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* dengan *quality of*

*regional government financial reporting*. Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian nilai selisih mutlak:

a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil dari uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,830 <sup>a</sup>	,689	,609	2,68572

a. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*, Kompetensi Sumber Daya Manusia  
Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.20 di atas nilai R adalah 0,830 atau 83% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk ke dalam kategori berpengaruh sangat kuat karena berada pada interval 0,80-1,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Zscore: *Assets Invenotory*, Zscore: *Assets Legal Audit*, Zscore: *Assets Valuation*, Zscore: Kompetensi Sumber Daya Manusia, X1\_M., X2\_M, dan X3\_M berpengaruh kuat terhadap *quality of regional government financial reporting*. Hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,609 yang berarti *quality of regional government financial reporting* dapat dijelaskan oleh variabel Zscore: *Assets Legal Audit*, Zscore: *Assets Valuation*, Zscore: Kompetensi Sumber Daya Manusia, X1\_M., X2\_M, dan X3\_M sekitar 60,9% dan sisanya sebesar 39,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F- Uji Simultan

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai *sig* dari F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/eror (*alpha*) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang di estimasi layak, sedangkan apabila nilai *sig* dari F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Hasil uji Statistik F dapat dilihat dari tabel 4.21 berikut ini:

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji F – Uji Simultan (Moderating)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431,990	7	61,713	8,556	,000 <sup>b</sup>
	Residual	194,753	27	7,213		
	Total	626,743	34			

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

b. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*, Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Hasil uji simultan pada tabel 4.21 menunjukkan nilai F hitung sebesar 8,556 dengan probabilitas 0,000 yang berada dibawah nilai 0,050. Hal ini berarti bahwa variabel *Zscore: Assets Inventory*, *Zscore: Assets Legal Audit*, *Zscore: Assets Valuation*, *Zscore: Kompetensi Sumber Daya Manusia*, *X1\_M*, *X2\_M*, dan *X3\_M* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap *quality of regional government financial reporting*.

## e. Uji t- Uji Parsial

Uji ini dilakukan untuk melihat sejauhmana pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji t – Uji Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	43,536	,971		44,823	,000
Zscore: <i>Assets Inventory</i>	,966	,621	,225	1,554	,132
Zscore: <i>Assets Legal Audit</i>	1,487	,670	,346	2,219	,035
Zscore: <i>Assets Valuation</i>	1,382	,567	,322	2,437	,022
Zscore: Kompetensi SDM	,767	,591	,179	1,299	,205
X1_M	-,059	,923	-,010	-,064	,949
X2_M	2,081	,942	,301	2,209	,036
X3_M	-,303	1,154	-,043	-,263	,795

a. Dependent Variable: *Quality of Regional Government Financial Reporting*  
Sumber: Output SPSS 21 (2018)

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 43,536 + 0,966ZX_1 + 1,487ZX_2 + 1,382ZX_3 + 0,767ZM - 0,059|ZX_1 - ZM| + 2,08|ZX_2 - ZM| - 0,303|ZX_3 - ZM|$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 43,536 menunjukkan bahwa jika variabel independen (*assets inventory*, *assets legal audit*, *assets valuation*, dan interaksi antara variabel moderasi dengan variabel independen)

diasumsikan sama dengan nol, maka *quality of regional government financial reporting* akan meningkat sebesar 43,536.

- b. Nilai koefisien regresi variabel *assets inventory* ( $X_1$ ) sebesar 0,966 dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets inventory* mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,966.
- c. Nilai koefisien regresi *assets legal audit* ( $X_2$ ) pada penelitian ini sebesar 1,487 dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets legal audit* mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 1,487.
- d. Nilai koefisien regresi *assets valuation* ( $X_3$ ) pada penelitian ini sebesar 1,382 dapat diartikan bahwa ketika variabel *assets valuation* mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 1,383.
- e. Nilai koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia pada penelitian ini sebesar 0,767 dapat diartikan bahwa ketika variabel kompetensi sumber daya manusia mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 0,767.
- f. Nilai koefisien regresi interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan *assets inventory* pada penelitian ini sebesar -0,059 dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan *assets inventory*, maka *quality of regional government financial reporting* akan mengalami penurunan sebesar -0,059

- g. Nilai koefisien regresi interaksi antara *assets legal audit* pada penelitian ini sebesar 2,081 dapat diartikan bahwa dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dengan *assets legal audit*, maka *of regional goverment financial reporting* akan mengalami peningkatan sebesar 2,081
- h. Nilai koefisien regresi interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan *assets valuation* pada penelitian ini sebesar -0,303 dapat diartikan bahwa dengan adanya interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan *assets valuation* maka *quality of regional goverment financial reporting* akan mengalami penurunan sebesar -0,303.

Pembahasan terkait pengujian hipotesis yang melibatkan variabel moderasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara *assets inventory* terhadap *quality of regional goverment financial reporting*.

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi  $X1\_M$  mempunyai nilai hitung sebesar  $-0,064 < t$  tabel sebesar 2,0518 dengan *unstandardized coefficients* beta sebesar -0,059 dan tingkat signifikansi 0,949 yang lebih besar dari 0,05, maka  $H_4$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel *assets inventory* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang diajukan dalam penelitian ini tidak terbukti atau ditolak.

- 2) Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting* (H<sub>5</sub>).

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi X2\_M mempunyai nilai t hitung sebesar 2,209 > nilai tabel t sebesar 2,0518 dengan *unstandardized coefficients* beta sebesar 2,081 dan tingkat signifikansi 0,036 yang lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>5</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan variabel *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, hipotesis kelima H<sub>5</sub> yang diajukan dalam penelitian ini terbukti atau diterima.

- 3) Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting* (H<sub>6</sub>).

Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa variabel moderasi X3\_M mempunyai nilai t hitung sebesar -0,263 < nilai t sebesar 2,0581 dengan *unstandardized coefficients* beta sebesar -0,303 dan tingkat signifikansi 0,795 yang lebih besar dari 0,05, maka H<sub>6</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan variabel *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*.

#### **F. Pembahasan**

Penelitian ini mengungkapkan tentang pengaruh pengelolaan aset tetap (*assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation*) terhadap *quality of regional government financial reporting* dengan kompetensi sumber daya

manusia sebagai variabel moderating dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini secara ringkas disajikan sebagai berikut ini:

**Tabel 4.23**  
**Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Signifikansi	Hasil
H <sub>1</sub>	<i>Assets inventory</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,038	Hipotesis Diterima
H <sub>2</sub>	<i>Assets legal audit</i> berpengaruh terhadap <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,045	Hipotesis Diterima
H <sub>3</sub>	<i>Assets valuation</i> berpengaruh terhadap <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,009	Hipotesis Diterima
H <sub>4</sub>	Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara <i>assets inventory</i> pada <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,949	Hipotesis Ditolak
H <sub>5</sub>	Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara <i>assets legal audit</i> pada <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,036	Hipotesis Diterima
H <sub>6</sub>	Kompetensi sumber daya manusia memoderasi pengaruh terhadap hubungan antara <i>assets valuation</i> pada <i>quality of regional government financial reporting</i>	0,795	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah (2018)

### **1. Pengaruh *Assets Inventory* Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting***

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melaksanakan kegiatan *Assets Inventory* (Inventarisasi Aset) dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan



pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran diperoleh fakta empiris bahwa, pejabat fungsional bendahara aset di setiap SKPD di Kabupaten Jeneponto telah melakukan kroscek terhadap seluruh barang sesuai dengan hasil pengadaan barang untuk memonitoring kondisi aset yang berada pada tiap-tiap SKPD Kabupaten Jeneponto, sehingga diperoleh data yang akurat dan terkini mengenai kondisi aset pada masing-masing SKPD di Kabupaten Jeneponto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori kepatuhan yang menjelaskan tentang seorang individu yang cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya *assets inventory* harus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tertibnya atau patuhnya pegawai di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto pada peraturan yang ada mengenai pengelolaan aset tetap khususnya *assets inventory* maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik sehingga pada saat laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diperiksa oleh BPK maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan kinerja terhadap para pegawai di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto sangat dibutuhkan untuk meraih kembali hasil opini yang sempat turun menjadi opini disklaimer.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Anshari dan Syofyan (2016) yang menyatakan bahwa semakin baik inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Febrianti (2016) dan Andiani

dkk (2017) yang menyatakan bahwa faktor inventaris tidak cukup menunjang penyajian kualitas laporan keuangan hal ini dikarenakan faktor inventaris sudah cukup terakomodir oleh faktor pembukuan yang merinci lebih jelas standard dan prosedur pencatatan, sehingga para pegawai tidak menganggap faktor yang krusial.

## **2. Pengaruh *Assets Legal Audit* Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting***

Sebagian besar memang pegawai di SKPD Kabupaten Jeneponto menganggap bahwa penerapan *assets legal audit* memang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset terutama dalam hal hukum. Dalam rangka menjamin aspek legal audit terhadap aset yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Jeneponto secara terus menerus melakukan upaya penertiban sertifikat atas aset yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Pemda, salah satunya yaitu bendahara barang dan aset di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto telah melakukan penelusuran administrasi pengadaan barang dan mencocokkan sertifikat yang dimiliki dengan barang yang ada. Tidak hanya bendahara barang dan aset di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto saja yang melakukan pengecekan namun juga keikutsertaan tim penilai dan pemeriksa aset pemerintah melakukan pengecekan terhadap setiap aset yang dimiliki oleh Pemda, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

*Assets legal audit* dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan legal yang menyangkut status kepemilikan aset. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya sengketaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah terhadap pegawai yang mengklaim bahwa aset yang dimilikinya benar miliknya.

Padahal aset tersebut diberikan pemerintah untuk menunjang kelancaran operasional terhadap pegawai yang bekerja di dinas tersebut. Hal ini terjadi karena adanya rasa memiliki aset daerah yang berlebihan di Kabupaten Jeneponto yang dapat memicu terjadinya kesimpangsiuran dan karut marutnya data aset daerah sehingga tidak jelas peruntukannya. Oleh karena itu, *assets legal audit* sangat dibutuhkan untuk meminimalisirkan kemungkinan penyalahgunaan aset oleh pihak lain secara tidak sah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori kepatuhan yang menjelaskan tentang seorang individu yang cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya *assets legal audit* harus memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tertibnya atau patuhnya pegawai di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto pada peraturan yang ada mengenai pengelolaan aset tetap khususnya *assets legal audit* maka akan menjamin keamanan terhadap aset yang dimiliki oleh pemerintah terhadap klaim dari pihak lain sehingga aset yang benar-benar milik pemerintah akan tercatat di dalam neraca pemerintah.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Anshari dan Syofyan (2016) dan Asman dkk (2016) yang menyatakan bahwa *assets legal audit* dilakukan guna menjamin keamanan aset dari segi legalitas sehingga akan menghindari biaya-biaya persengketaan aset. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Jamaludin (2017) yang menyatakan bahwa *assets legal audit* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi aset tetap. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti Pemerintah Daerah Provinsi NTB belum

mempertimbangkan dan menjadikan *Assets Legal Audit* sebagai faktor penentu optimalisasi pengelolaan aset dan manajemen aset tetap.

### **3. Pengaruh *Assets Valuation* Terhadap *Quality of Regional Government Financial Reporting***

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dipandang telah melakukan penilaian terhadap aset tetap secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana penilaian dilakukan oleh lembaga independen dan bersertifikat dibidang penilaian aset sehingga didapatkan nilai wajar atas aset tetap yang dimiliki dan diketahui informasi nilai kekayaan yang terkandung dalam aset tersebut, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

*Assets valuation* merupakan tindakan untuk mendukung kepastian nilai yang akan digunakan dalam penyusunan neraca awal yang memiliki peran penting karena akan terbawa terus dan dipakai sebagai dasar dalam menentukan posisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, *asset valuation* sangat penting untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan daerah yang lebih baik karena hasil penilaian inilah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pengelolaan aset/ barang milik daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori kepatuhan yang menjelaskan tentang seorang individu yang cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya *assets valuation* harus memenuhi kepatuhan terhadap mekanisme penilaian barang yang dilakukan oleh seorang

penilai yaitu sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Oleh karena itu, tertibnya atau patuhnya seorang penilai terhadap Standar Penilaian Indonesia yang diterapkan di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto mengenai pengelolaan aset tetap khususnya *assets valuation* maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik sehingga pada saat laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diperiksa oleh BPK maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Poae dkk (2017) yang menyatakan bahwa *asset valuation* yang baik akan menghasilkan penyajian nilai neraca atas aset pemerintah daerah akan memadai sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anshari dan Syofyan (2016) yang menyatakan bahwa apabila dilakukan peningkatan terhadap penilaian Barang Milik Daerah pada pemerintah Kota Padang, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Padang.

#### **4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Terhadap Hubungan Antara *Assets Inventory* Pada *Quality Of Regional Government Financial Reporting*.**

Berdasarkan hasil regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak, kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan antar variabel, dengan demikian hipotesis keempat ditolak.

Justifikasi yang dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi hubungan *assets inventory* terhadap *quality of regional*

*government financial reporting*, disebabkan, bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan dengan cermat, akurat, dan sesuai dengan SAP agar menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan. Namun, selain faktor kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola aset milik daerah, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti masalah kelemahan sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BPK, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 kembali meraih opini disklaimer.

Adanya temuan kesalahan/ penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK tersebut menurut peneliti bukan semata-mata karena rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia di setiap SKPD, tetapi adanya rasa kepemilikan aset milik daerah yang berlebihan. Terlihat bahwa pegawai yang telah dipindahtugaskan masih membawa aset milik daerah di SKPD yang bukan tempatnya bekerja dan ketika aset tersebut diperiksa oleh BPK terlihat dalam laporan namun secara fisik aset tersebut tidak ada di SKPD tersebut. Oleh karena itu, temuan dalam pemeriksaan BPK tersebut menyebabkan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto turun dari predikat WDP menjadi disklaimer. Selain itu, tidak adanya kebijakan untuk membentuk tim inventarisasi terhadap aset milik daerah.

Penurunan predikat laporan keuangan tersebut membuktikan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang pengelolaan aset

khususnya *assets inventory* bukanlah pengaruh yang signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting*.

**5. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Terhadap Hubungan Antara *Assets Legal Audit* Pada *Quality Of Regional Government Financial Reporting*.**

Legalitas yang dimaksudkan disini yaitu kelengkapan administrasi dan bukti kepemilikan yang terkait dengan alih kepemilikan atau pemindahtanganan. Menurut Sukandar (2017) mengatakan bahwa legal audit harus dilakukan secara teliti dan seksama dengan meliputi hal-hal seperti fisik organisasi, kelengkapan dokumen, serta kondisi objek transaksi. Dokument-dokumen penting yang terdapat di Kabupaten Jeneponto, antara lain:

- a) Dokumen-dokumen mengenai aset pemerintah daerah, antara lain berupa sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat tanda bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dokumen-dokumen kepemilikan laptop, dan sebagainya.
- b) Surat Perjanjian (kontrak) adalah perbuatan hukum, di mana satu pihak mengikatkan diri dengan pihak lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan isi kontrak tersebut.

Justifikasi yang dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting*, disebabkan karena kompetensi sumber daya manusia yang kompeten akan melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya. Bendahara barang yang merupakan pengelola aset milik daerah di setiap SKPD memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya yaitu di bidang akuntansi, sehingga bendahara barang mampu melakukan pengamanan terhadap

aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di setiap SKPD agar terhindar dari masalah persengketaan aset. Terlihat bahwa adanya dokumen-dokumen dan perjanjian (kontrak) mengenai aset milik pemerintah di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto dipegang oleh bendahara barang selaku pengelola aset milik daerah di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto. Dengan lengkapnya administrasi dan bukti kepemilikan atas aset milik daerah ini maka aparat pemerintah terus melakukan pengecekan atas aset yang dimiliki agar aset tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tidak hanya itu, permasalahan tentang persengketaan aset milik daerah sampai saat ini belum pernah terjadi. Hal ini dikarenakan bahwa, adanya kompetensi sumber daya manusia yang kompeten dan inisiatif yang dilakukan di jauh hari yang mampu mengelola aset milik pemerintah daerah baik tanah, kendaraan, laptop dan aset lainnya telah terlegal yang dipegang oleh bendahara barang di setiap SKPD Kabupaten Jeneponto serta pelatihan terhadap SDM terus dilakukan untuk mengelola aset milik daerah agar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Memahami peran sumber daya manusia dalam *assets legal audit* dapat memiliki efek yang penting dalam pengamanan aset agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dengan lengkapnya administrasi dan bukti kepemilikan atas aset milik daerah yang dilakukan melalui legalitas untuk pengamanan aset menandakan bahwa aparat telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah mengegalkan budaya disiplin pada dirinya.



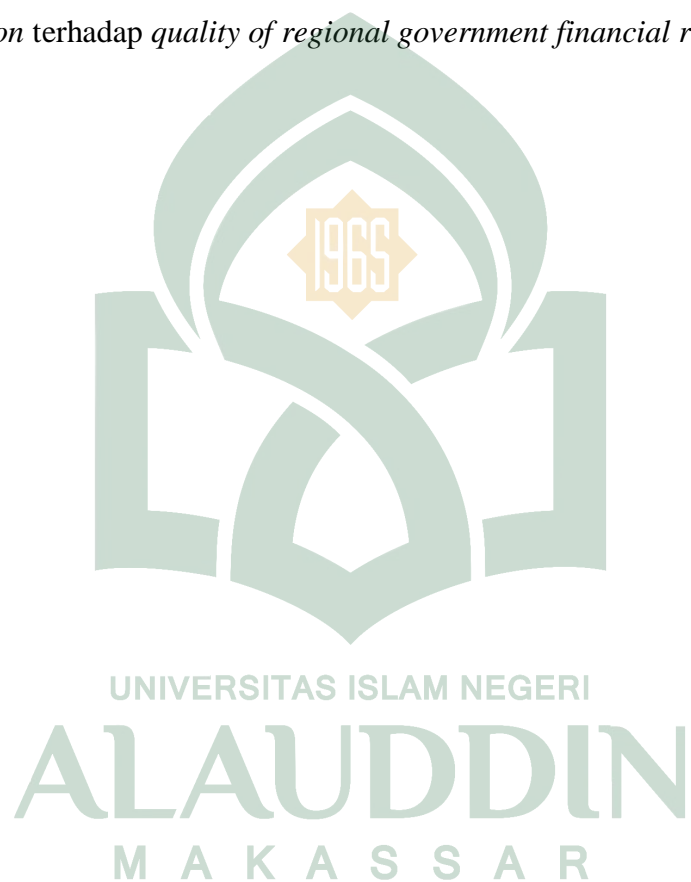
**6. Kompetensi Sumber Daya Manusia Memoderasi Pengaruh Terhadap Hubungan Antara *Assets Valuation* Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting*.**

Hipotesis keenam ( $H_6$ ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Berdasarkan hasil regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak, kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan antar variabel, dengan demikian hipotesis keenam ditolak..

Kegiatan *assets valuation* sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independent. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual (Montayop dkk, 2016). Adanya *assets valuation* ini akan mempermudah dalam menyusun laporan keuangan yang berupa neraca yang akan menyajikan aset yang dimiliki oleh daerah.

Justifikasi, yang dapat dijelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak memoderasi hubungan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*, disebabkan karena terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi *quality of regional government financial reporting* seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi daerah yang masih kurang. Sistem informasi akuntansi pada dasarnya dapat di operasikan tanpa menggunakan komputer, akan tetapi keterlibatan komputer dalam menangani tugas-tugas manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang

kelancaran sebuah sistem, sehingga informasi sangat dibutuhkan pihak manajemen dapat disajikan dengan cepat dan tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa jika semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik ( Tawaqal dan Suparno, 2017; Putra dkk, 2017). Oleh karena itu, kompetensi sumber daya yang kompeten bukanlah satu-satu variabel yang mampu memperkuat hubungan antara variabel *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting* dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating. Responden dalam penelitian ini berjumlah 35 pegawai pemerintahan yang terdiri dari 10 SKPD Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *assets inventory* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting*. Hal ini berarti bahwa semakin baik *assets inventory* maka *quality of regional government financial reporting* akan semakin baik. Oleh karena itu, uji hipotesis tersebut diterima.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *assets legal audit* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting*. Hal ini berarti bahwa semakin baik *assets legal audit* maka *quality of regional government financial reporting* akan semakin baik. Oleh karena itu, uji hipotesis tersebut diterima.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa *assets valuation* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *quality of regional government financial reporting*. Hal ini berarti bahwa semakin baik *assets valuation* maka *quality*

*of regional government financial reporting* akan semakin baik. Oleh karena itu, uji hipotesis tersebut diterima.

4. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat hubungan antara *assets inventory* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, hipotesis tersebut ditolak.
5. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel moderating yang memperkuat hubungan antara *assets legal audit* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, hipotesis tersebut diterima.
6. Hasil analisis regresi moderasi dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukan merupakan variabel moderating yang memperkuat hubungan antara *assets valuation* terhadap *quality of regional government financial reporting*. Oleh karena itu, hipotesis tersebut ditolak.

#### **B. Keterbatasan Penelitian**

1. Tidak semua responden mengisi kuisioner di depan peneliti, atas permintaan responden untuk meninggalkan kuisioner tersebut karena kesibukan responden sehingga kemungkinan adanya ketidakseriusan responden dalam menjawab semua pernyataan yang disajikan oleh peneliti. Akibatnya jawaban yang diberikan belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Dalam penelitian ini, penggunaan kuisioner sebagian besar masih menggunakan kuisioner yang dipakai oleh peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pengukurannya karena belum tentu menggambarkan keadaan yang sama pada objek peneliti sebelumnya.
3. Hanya 10 dari 23 SKPD di Kabupaten Jeneponto yang bersedia menjadi responden, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dan adanya kegiatan daerah yang dilakukan pemerintah daerah sehingga sebagian pegawai di SKPD Kabupaten Jeneponto harus meninggalkan kantor untuk mengikuti kegiatan tersebut.
4. Penelitian ini hanya berfokus pada SKPD di Kabupaten Jeneponto, sehingga untuk peneliti selanjutnya agar sekiranya bisa memperluas maupun objek penelitian.

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, terkhusus pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Jeneponto, diharapkan agar selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja para pegawai pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi sumber daya manusia serta melakukan sensus barang dan buku mutasi barang serta pemanfaatan terhadap sistem informasi pengelolaan aset milik daerah agar pengelolaan aset milik daerah menjadi tertib administrasi dan dapat menyajikan laporan aset milik daerah

secara tepat waktu sehingga akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akan memberikan opini yang diharapkan oleh semua pihak di Kabupaten Jeneponto.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas objek penelitian, tidak hanya pada SKPD di Kabupaten Jeneponto saja namun juga pada Badan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti pemanfaatan sistem informasi terhadap pengelolaan aset milik daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Surya. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). *Artikel Ilmiah*, Vol 5(2). Hal: 1-22
- Aira, Aras. 2014. Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 17(1). Hal: 21-38
- Al-quranul Karim dan Terjemahannya. Alfatih: PT Insan Media Pustaka. 2004
- Andiani, N. J, dkk. 2017. Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta). *Jurnal e-Proceeding of Management*, Vol 4(3). Hal: 2796-2803
- Anshari dan Syofyan, Efrizal. 2016. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Jurnal riset manajemen bisnis dan publik*, Vol 4(1). Hal: 1-18
- Antara. 2017. BPK Sulsel Nilai Disclaimer Jeneponto Karena Aset. *Situs Resmi Antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. <https://makassar.antaranews.com/berita/83937/bpk-sulsel-nilai-disclaimer-jeneponto-karena-aset>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Armel, R.Y.G, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, Vol 4(1). Hal: 105-118
- Asman, Auliah, dkk. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Assets*, Vol 6(1). Hal: 23-38
- Ayem, Sri dan Husen. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP Berbasis Akrua, SIMDA, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta). *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol 25(1)
- Azhar, Iqlima. 2017. Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi Terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol 1(1)
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Bokingo, A, dkk. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol). *Jurnal Katalogis*, Vol 5(12). Hal: 43-54

- BPK RI. 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016 Pada Kabupaten Jeneponto, Soppeng, Sinjai Dan Luwu Timur. *Situs Resmi BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan*. <http://makassar.bpk.go.id/?p=12804>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Demetouw, Moses,dkk. 2017. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 2(2)
- Fajar. 2016. Dewan Tetapkan 23 Dinas dan 5 Badan. *Situs Resmi Fajar*. <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/11/22/dewan-tetapkan-23-dinas-dan-5-badan/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Febrianti, Sukma. 2016. Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol 10(1)
- Firman, La Ode. 2017. Efektivitas Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Pemendagri No.17 Tahun 2007 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013
- Halim, Abdu. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Kencana, Edisi Pertama
- Harmonika, Sri. 2017. Hadist-hadist tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal At-Tadair*, Vol 1(1)
- Hasanah, Nurmalia dan Fauzi,Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : In Media
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (*Studi Empiris Pada Skpd Kab. Lima Puluh Kota*). *Artikel Akuntansi*
- Jamaluddin. 2017. Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Dan Penilaian Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi NTB, Vol 1(1)
- Karmila,dkk. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal SOROT*, Vol 9(1)



- Kolinung, M.S, dkk. 2015. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, Vol 3(1)
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, Edisi Empat
- Kurnianto, Okta Dwi. 2017. “Pengaruh Penetahusahaab Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemrintah Kabupaten Magelang)”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
- Limbong, N.I.E. 2016. Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas). *JOM FISIP*, Vol 3(2)
- Maabuat, J.S, dkk. 2016. Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Accountability*, Vol 5(2)
- Mahardini, N.Y,dkk. 2018. Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1)
- Majid, Jamaluddin dan Ambo Asse. 2018. Time Budget Preasure And Turnover Intention With Dysfuctional Accountant Behavior. *IJEMSS*, Vol 1(1)
- Majid, Jamaluddin. 2018. The Effect Of Financial Distress And Disclosure On Going Concern Opinion Of The Banking Company Listing In Indonesian Stock Exchange. *IJRSM*, Vol 6(1)
- Modo, S. M, dkk. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, Vol 7(2)
- Montayop,P.F, dkk. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 1(2)
- Mursyidi, 2013. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Edisi Kedua
- Nasution, Erlini, dkk. 2015. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, Vol 18(1)
- Pangaribuan, L.V.R, dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (KLK). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol 1(2)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Poae, Yulpi, dkk. 2017. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol 8(1)
- Pujanira, Putriasri dan Taman, Abdullah. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nomina*, Vol 6(2)
- Putra, D.K.A.D.S.A, dkk. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 8(2)
- Putri, I.D, dkk. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal e-Proceeding of Management*, Vol 4(2)
- Rahman, Dicky. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jurnal Jom FEKON*, Vol 2(2).
- Ramli, Muhammad. 2014. *Manajemen Strategik Sektor Publik*. Makassar: Alauddin University Press
- Ranuba, Erlita D.S, dkk. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol 3(1). Hal: 388-397.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Rosalina, Santi. 2010. *Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender*. Skripsi. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Rumenser, Peggy. 2014. Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset dan Auditing "Goodwill"*, Vol 5(2)

- Saren, C. M, dkk. 2016. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, Vol 4(4)
- Sari, I.M dan Tamrin, N. A. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Government* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*, Vol 1(1)
- Septiani, Aditya. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang*. Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan. Hal 13-14.
- Setiawan, I.W.N dan Gayatri. 2017. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 21(1). Hal: 671-700
- Sherly,dkk. 2017. Pengaruh Inventarisasi, Legal audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, Vol 8(2)
- Simamora, Rudianto dan Halim, Abdu. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 13(2)
- Sinambela,L.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta
- Sukandar, Dadang. 2017. Mengelola Dokumen Legal Perusahaan (Perizinan dan Kontrak). *Situs Legal Akses*. <http://www.legalakses.com/mengelola-dokumen-legal-perusahaan-perizinan-dan-kontrak/>. Diakses pada tanggal 14 November 2018
- Sumual, S.C,dkk. 2017. Evaluasi Sistem Pembinaan, Penatausahaan, dan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Di Pemerintahan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12(2)
- Supit, Priscila T, dkk. 2017. Evaluasi Penatahan Barang Milik Daerah Menurut PP No. 27 Tahun 2014 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12(2)
- Supranto, J dan Abdullah,S. 2017. *Pengantar Statistik Untuk Berbagai Bidang Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cetakan 1
- Supranto, J. 2009. *Statistik Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga, Edisi Ketujuh, Jilid 2

- Syahadatina, Rika dan Fitriyana, Ismiatika. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 1(1)
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, Vol 14(2)
- Tawaqal, Irzal dan Suparn. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 2(4)
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Wujud Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
- Wahyuni, Aci Dian. 2015. Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Pekanbaru Di Kelurahan Pulau Karam Kecamatan Sukajadi Tahun 2012. *Jom FISIP*, Vol 2(1)
- Widayanti, Endang. 2010. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Wijayanti, Ratna dan Handayani, Nur. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 6(3)
- Worung, Pangky L.L, dkk. 2015. Hubungan Umur, Status Perkawinan dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Praktik Keperawatan Jiwa Di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. V. L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 7(4)
- Yendrawati, Reny. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Inter dan Kapaistas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating. *JAAI*, Vol 17(2)
- Yensi, D. S,dkk. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOKOM FEKOM*, Vol 1
- Yuliansyah, Rahmat. 2016. Analisis Sistem Inventarisasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol 25(2)

## LAMPIRAN 1

### KUESIONER PENELITIAN

Makassar, Juli 2018

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Eks.  
Perihal : Mohon kesediaan  
menjadi responden

Kepada :  
Yth. Bapak/ Ibu Responden  
di –  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi saya sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dengan ini saya:

Nama : Juimarliana

Nim : 90400114160.

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i pegawai negeri pengelola keuangan pada SKPD di Kabupaten Jeneponto untuk mengisi daftar pernyataan terlampir berikut. Untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap rata-rata memerlukan waktu  $\pm$  15 menit.

Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat saya perlukan sebagai bahan penelitian saya tentang “Pengaruh *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Dan Assets Valuation Terhadap Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)”.

Sesuai dengan etika penelitian, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i Pegawai penyusun Laporan Keuangan SKPD bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner yang telah diisi mohon dikembalikan kepada saya (peneliti).

Peneliti menyampaikan rasa penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i pegawai penyusun laporan keuangan SKPD untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kontribusi yang

diberikan akan sangat berharga baik bagi peneliti maupun bagi pengembangan Pengelolaan Aset khususnya *assets inventory*, *assets legal audit*, dan *assets valuation* di SKPD Kabupaten Jenepono. Bapak/Ibu/Saudara/i karyawan diminta untuk menjawab semua pernyataan berikut secara terbuka, jujur dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi karir Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai karyawan dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Informasi yang diberikan akan dijamin kerahasiaannya. Untuk keperluan tersebut, kami mohon kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi selaku responden penelitian dan jawaban atas kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian karena jawaban atas kuesioner ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk maksud lain.

Demikian permohonan saya, atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Juimarliana



### A. Identitas Responden

1. Nama SKPD : .....
2. Nama (*boleh tidak diisi*) : .....
3. Usia : ☐ <25 ☐ 36-40  
☐ 26-30 ☐ >40  
☐ 31-35
4. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
5. Pendidikan Terakhir : ☐ S3 ☐ S2 ☐ S1  
☐ D3 ☐ SLTA/Sederajat
6. Masa Kerja : ☐ 1-2 Tahun ☐ 10-15 Tahun  
☐ 3-5 Tahun ☐ 15-20 Tahun  
☐ 5-10 Tahun ☐ ≥ 20 Tahun
7. Jabatan : .....

### B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum menjawab pertanyaan/ pernyataan kuesioner, dimohon kepada responden untuk terlebih dahulu mengisi identitas responden sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
2. Bacalah pertanyaan/ pernyataan dalam kuesioner ini secara teliti dan berikan tanda silang (X) atau (√) pada salah satu alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu yang dialami di lapangan.
3. Dimohon untuk menjawab sesuai dengan pengalaman/ pendapat anda sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (jujur), karena tidak ada jawaban yang salah atau benar.



### DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL *ASSETS INVENTORY*

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN
	<b>Inventarisasi Fisik</b>	
1	Terhadap aset tetap di lingkungan Pemda Kab. Jeneponto sudah dilakukan kodifikasi/ labeling aset menurut jenis dan lokasinya	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
2	Dengan kegiatan inventarisasi telah didapatkan data yang lengkap dari seluruh aset tetap yang dimiliki, baik dengan pembelian atau perolehan dengan cara lainnya	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
3	Dalam rangka inventarisasi aset tetap di lingkungan Pemda Kab. Jeneponto sudah mengelompokkan aset tetap menurut jenis/ bidangnya	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Inventarisasi Yuridis</b>	
4	Pemda Kab. Jeneponto telah melakukan pendataan terhadap aset tetap yang dimiliki dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
5	Pelaksanaan pembukuan aset tetap telah dibuat secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju



### DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL *ASSETS LEGAL AUDIT*

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN
	<b>Status Penguasaan Aset</b>	
1	Pemda Kab. Jeneponto telah melakukan pemeriksaan dan/ atau penilaian terhadap setiap data transaksi yang terkait dengan pihak lain terutama yang berkaitan dengan aspek legal	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
2	Pemda Kab. Jeneponto telah melakukan pengurusan sertifikasi kepemilikan atas aset tanah yang dimiliki	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
3	Pemda Kab. Jeneponto sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai status penguasaan aset tetap	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Sistem dan Prosedur Penguasaan Aset atau Pemindahtanganan Aset</b>	
4	Pemda Kab. Jeneponto sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai sistem dan prosedur pengadaan aset tetap	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
5	Pemda Kab. Jeneponto sudah melakukan pengaturan yang jelas mengenai sistem dan prosedur pengalihan aset tetap	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Pengidentifikasian Adanya Indikasi Permasalahan Legalitas</b>	
6	Pemda Kab. Jeneponto telah melakukan upaya pengidentifikasian terhadap adanya indikasi permasalahan hukum terkait aset tetap	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju

		<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
7	Pemda Kab. Jeneponto sudah mampu untuk mengatasi segala permasalahan terkait legalitas aset tetap	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju

#### DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL *ASSETS VALUATION*

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN
	<b>Konsultan Penilaian yang Independen</b>	
1	Pemda Kab. Jeneponto dalam melakukan penilaian aset tetap telah dilakukan oleh tim/ lembaga penilai yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Nilai Kekayaan Aset Tetap</b>	<input type="checkbox"/>
2	Kegiatan penilaian aset oleh Pemda Kab. Jeneponto telah memberikan nilai wajar terhadap nilai aset tetap milik pemerintah daerah	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Informasi Nilai Kekayaan yang Terkandung Di Dalam Aset</b>	<input type="checkbox"/>
3	Kegiatan penilaian terhadap aset tetap di lingkungan Pemda Kab. Jeneponto telah dilakukan sehingga diketahui secara pasti informasi nilai kekayaan yang terkandung di dalam aset tersebut	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju

**DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARAIBEL KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA**

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN
	<b>Pengetahuan</b>	
1	Pegawai mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
2	Pegawai telah memahami teori yang berkaitan dengan penatausahaan BMD dengan baik	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
3	Pegawai telah memahami semua aturan yang berkaitan dengan penatausahaan BMD dengan baik	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Keterampilan</b>	
4	Pegawai telah menerima pendidikan dan pelatihan yang dapat menunjang pekerjaan pegawai dalam panatausahaan BMD	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
5	Pegawai selalu melaksanakan tugas tepat waktu	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
6	Bapak/ Ibu/ Sdr/i telah sering berpindah tugas dari bagian satu ke bagian lainnya	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju

	<b>Pengalaman</b>	
7	Pengalaman yang Anda miliki sangat mempengaruhi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam menyelesaikan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
8	Semakin sering Bapak/Ibu/Sdr/i melakukan tugas berbeda, semakin berpengalaman untuk menyelesaikannya	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju

**DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL *QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING***

No	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN
	<b>Relevan</b>	
1	Laporan keuangan yang dihasilkan memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
2	Informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
3	Laporan keuangan diselesaikan tepat waktu	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
4	Informasi laporan keuangan disajikan secara lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju

		<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
5	Pemerintah daerah telah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Andal</b>	
6	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
7	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
8	Laporan keuangan menyajikan informasi yang diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
9	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Dapat Dibandingkan</b>	
10	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju <input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
	<b>Dapat Dipahami</b>	
11	Informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna	<input type="checkbox"/> Sangat Setuju <input type="checkbox"/> Setuju <input type="checkbox"/> Cukup Setuju <input type="checkbox"/> Tidak Setuju

		<input type="checkbox"/> Sangat Tidak Setuju
--	--	--

Sumber: Asman (2016) dan Kurnianto (2017)

### Tabulasi Jawaban Responden

No.	ASSETS INVENTORY					TOTAL
	X1	X2	X3	X4	X5	
1	4	4	4	5	5	22
2	4	4	4	3	4	19
3	5	4	4	4	4	21
4	4	5	3	4	4	20
5	4	5	3	4	4	20
6	5	5	5	4	5	24
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	4	20
9	4	5	4	5	4	22
10	3	4	4	4	3	18
11	4	4	5	5	5	23
12	5	3	5	4	5	22
13	5	4	3	5	4	21
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	5	4	4	5	4	22
18	5	4	4	5	4	22
19	3	4	3	4	4	18
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	5	5	5	5	5	25
23	5	4	4	4	3	20
24	3	3	4	4	4	18
25	5	5	5	4	5	24
26	4	5	5	5	5	24
27	4	4	5	4	4	21
28	5	5	5	4	4	23
29	4	4	3	4	3	18
30	5	4	3	5	4	21
31	5	4	4	4	3	20
32	4	4	5	4	4	21
33	5	4	4	5	4	22
34	4	5	4	5	4	22
35	4	4	5	4	4	21

No.	ASSETS LEGAL AUDIT							TOTAL
	X1	x2	x3	X4	X5	X6	X7	
1	4	4	4	4	4	4	4	28
2	4	3	4	4	4	4	4	27
3	3	5	4	4	5	4	4	29
4	4	5	4	4	4	5	4	30
5	3	5	4	3	4	3	4	26
6	4	5	5	4	4	4	5	31
7	5	5	5	5	5	5	5	35
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	2	3	3	24
10	4	4	3	3	2	3	3	22
11	4	4	4	4	2	4	4	26
12	4	5	3	5	5	4	5	31
13	3	4	2	4	2	4	4	23
14	3	4	3	4	3	3	4	24
15	4	5	5	5	4	5	4	32
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	5	5	5	4	4	5	4	32
18	5	5	5	4	2	5	4	30
19	4	3	4	4	3	3	3	24
20	5	5	5	5	5	5	5	35
21	4	4	4	5	4	4	4	29
22	5	5	5	5	5	5	4	34
23	4	3	4	3	3	3	3	23
24	4	4	4	3	3	3	3	24
25	4	4	4	4	4	4	4	28
26	4	4	4	4	4	4	5	29
27	4	5	4	4	4	5	4	30
28	4	4	2	2	4	4	4	24
29	3	4	3	3	3	3	3	22
30	3	4	2	4	2	4	4	23
31	4	3	4	3	3	3	3	23
32	4	5	4	4	4	5	4	30
33	5	5	5	4	4	5	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	3	4	4	3	3	3	24

No.	ASSETS VALUATION			TOTAL
	x1	x2	x3	
1	2	4	4	10
2	2	4	4	10
3	4	4	5	13
4	5	5	4	14
5	5	5	4	14
6	4	4	5	13
7	5	5	5	15
8	4	4	4	12
9	4	4	4	12
10	4	4	4	12
11	4	4	4	12
12	5	5	3	13
13	3	4	3	10
14	2	3	2	7
15	3	4	4	11
16	4	4	4	12
17	4	3	3	10
18	4	3	3	10
19	4	4	4	12
20	5	5	5	15
21	4	4	4	12
22	4	5	5	14
23	3	4	4	11
24	4	4	3	11
25	4	4	4	12
26	3	3	3	9
27	4	4	5	13
28	4	5	4	13
29	3	3	4	10
30	3	4	3	10
31	3	4	4	11
32	4	4	5	13
33	4	3	3	10
34	4	4	4	12
35	4	4	4	12



No.	ASSETS INVENTORY					TOTAL	KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA								TOTAL
	X1	X2	X3	X4	X5		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
1	4	4	4	5	5	22	4	4	3	4	3	4	4	4	30
2	4	4	4	3	4	19	3	3	3	3	4	4	4	4	28
3	5	4	4	4	4	21	5	5	5	5	4	4	4	3	35
4	4	5	3	4	4	20	4	3	5	4	5	3	3	5	32
5	4	5	3	4	4	20	4	3	5	4	5	3	3	5	32
6	5	5	5	4	5	24	1	3	3	2	3	4	4	4	24
7	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	4	3	4	4	34
9	4	5	4	5	4	22	4	4	4	4	3	3	4	3	29
10	3	4	4	4	3	18	3	3	3	3	3	4	4	4	27
11	4	4	5	5	5	23	3	3	3	4	3	4	4	4	28
12	5	3	5	4	5	22	4	4	4	4	5	4	4	4	33
13	5	4	3	5	4	21	4	4	4	5	4	4	4	4	33
14	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	4	4	4	5	36
16	4	4	4	4	4	20	3	4	3	3	4	4	4	4	29
17	5	4	4	5	4	22	4	3	3	4	4	3	4	4	29
18	5	4	4	5	4	22	3	4	4	5	3	2	4	3	28
19	3	4	3	4	4	18	3	3	3	3	4	4	5	5	30
20	5	5	5	5	5	25	2	4	5	5	5	4	4	5	34
21	5	5	5	5	5	25	4	3	3	4	3	4	4	3	28
22	5	5	5	5	5	25	4	4	5	4	5	5	5	5	37
23	5	4	4	4	3	20	3	3	3	3	4	4	4	5	29
24	3	3	4	4	4	18	3	4	4	4	4	2	3	4	28
25	5	5	5	4	5	24	3	4	4	4	4	4	4	3	30
26	4	5	5	5	5	24	3	3	3	4	2	4	5	5	29
27	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	3	4	4	31
28	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	5	4	4	4	33
29	4	4	3	4	3	18	3	3	3	4	4	4	4	4	29
30	5	4	3	5	4	21	4	4	4	5	4	4	4	4	33
31	5	4	4	4	3	20	3	3	3	4	4	4	4	4	29
32	4	4	5	4	4	21	4	4	3	4	4	4	4	4	31
33	5	4	4	5	4	22	4	3	3	4	4	3	4	4	29
34	4	5	4	5	4	22	2	3	3	3	3	3	3	3	23
35	4	4	5	4	4	21	3	3	3	3	4	4	5	5	30

No.	ASSETS LEGAL AUDIT							TOTAL	KOMPETENSI SDM								TOTAL
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	3	4	3	4	4	4	30
2	4	3	4	4	4	4	4	27	3	3	3	3	4	4	4	4	28
3	3	5	4	4	5	4	4	29	5	5	5	5	4	4	4	3	35
4	4	5	4	4	4	5	4	30	4	3	5	4	5	3	3	5	32
5	3	5	4	3	4	3	4	26	4	3	5	4	5	3	3	5	32
6	4	5	5	4	4	4	5	31	1	3	3	2	3	4	4	4	24
7	5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	5	5	4	3	4	4	34
9	4	4	4	4	2	3	3	24	4	4	4	4	3	3	4	3	29
10	4	4	3	3	2	3	3	22	3	3	3	3	3	4	4	4	27
11	4	4	4	4	2	4	4	26	3	3	3	4	3	4	4	4	28
12	4	5	3	5	5	4	5	31	4	4	4	4	5	4	4	4	33
13	3	4	2	4	2	4	4	23	4	4	4	5	4	4	4	4	33
14	3	4	3	4	3	3	4	24	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	4	5	5	5	4	5	4	32	4	5	5	5	4	4	4	5	36
16	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	3	3	4	4	4	4	29
17	5	5	5	4	4	5	4	32	4	3	3	4	4	3	4	4	29
18	5	5	5	4	2	5	4	30	3	4	4	5	3	2	4	3	28
19	4	3	4	4	3	3	3	24	3	3	3	3	4	4	5	5	30
20	5	5	5	5	5	5	5	35	2	4	5	5	5	4	4	5	34
21	4	4	4	5	4	4	4	29	4	3	3	4	3	4	4	3	28
22	5	5	5	5	5	5	4	34	4	4	5	4	5	5	5	5	37
23	4	3	4	3	3	3	3	23	3	3	3	3	4	4	4	5	29
24	4	4	4	3	3	3	3	24	3	4	4	4	4	2	3	4	28
25	4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	4	4	4	3	30
26	4	4	4	4	4	4	5	29	3	3	3	4	2	4	5	5	29
27	4	5	4	4	4	5	4	30	4	4	4	4	4	3	4	4	31
28	4	4	2	2	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	4	4	33
29	3	4	3	3	3	3	3	22	3	3	3	4	4	4	4	4	29
30	3	4	2	4	2	4	4	23	4	4	4	5	4	4	4	4	33
31	4	3	4	3	3	3	3	23	3	3	3	4	4	4	4	4	29
32	4	5	4	4	4	5	4	30	4	4	3	4	4	4	4	4	31
33	5	5	5	4	4	5	4	32	4	3	3	4	4	3	4	4	29
34	4	4	4	4	4	4	4	28	2	3	3	3	3	3	3	3	23
35	4	3	4	4	3	3	3	24	3	3	3	3	4	4	5	5	30

No.	ASSETS VALUATION			TOTAL	KOMPETENSI SDM								TOTAL
	X1	X2	X3		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	
1	4	4	4	12	4	4	3	4	3	4	4	4	30
2	4	3	4	11	3	3	3	3	4	4	4	4	28
3	3	5	4	12	5	5	5	5	4	4	4	3	35
4	4	5	4	13	4	3	5	4	5	3	3	5	32
5	3	5	4	12	4	3	5	4	5	3	3	5	32
6	4	5	5	14	1	3	3	2	3	4	4	4	24
7	5	5	5	15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	4	12	4	5	5	5	4	3	4	4	34
9	4	4	4	12	4	4	4	4	3	3	4	3	29
10	4	4	3	11	3	3	3	3	3	4	4	4	27
11	4	4	4	12	3	3	3	4	3	4	4	4	28
12	4	5	3	12	4	4	4	4	5	4	4	4	33
13	3	4	2	9	4	4	4	5	4	4	4	4	33
14	3	4	3	10	3	3	3	3	3	3	3	3	24
15	4	5	5	14	4	5	5	5	4	4	4	5	36
16	4	4	4	12	3	4	3	3	4	4	4	4	29
17	5	5	5	15	4	3	3	4	4	3	4	4	29
18	5	5	5	15	3	4	4	5	3	2	4	3	28
19	4	3	4	11	3	3	3	3	4	4	5	5	30
20	5	5	5	15	2	4	5	5	5	4	4	5	34
21	4	4	4	12	4	3	3	4	3	4	4	3	28
22	5	5	5	15	4	4	5	4	5	5	5	5	37
23	4	3	4	11	3	3	3	3	4	4	4	5	29
24	4	4	4	12	3	4	4	4	4	2	3	4	28
25	4	4	4	12	3	4	4	4	4	4	4	3	30
26	4	4	4	12	3	3	3	4	2	4	5	5	29
27	4	5	4	13	4	4	4	4	4	3	4	4	31
28	4	4	2	10	4	4	4	4	5	4	4	4	33
29	3	4	3	10	3	3	3	4	4	4	4	4	29
30	3	4	2	9	4	4	4	5	4	4	4	4	33
31	4	3	4	11	3	3	3	4	4	4	4	4	29
32	4	5	4	13	4	4	3	4	4	4	4	4	31
33	5	5	5	15	4	3	3	4	4	3	4	4	29
34	4	4	4	12	2	3	3	3	3	3	3	3	23
35	4	3	4	11	3	3	3	3	4	4	5	5	30

No.	QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING											Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	
1	5	4	5	4	5	5	4	3	4	3	4	46
2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	45
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
4	4	5	4	5	5	4	3	3	5	4	5	47
5	4	5	4	5	5	4	3	3	5	4	5	47
6	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	51
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
8	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	45
9	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	48
10	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	39
11	4	4	3	3	5	4	3	4	3	3	3	39
12	5	5	4	5	5	5	4	4	4	3	5	49
13	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	43
14	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	34
15	5	5	4	4	5	5	4	2	2	4	4	44
16	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	43
17	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	48
18	3	5	5	4	4	4	2	4	4	3	4	42
19	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	46
20	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	50
21	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	48
22	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	54
23	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	41
24	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	38
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	4	46
27	4	5	5	4	5	4	2	2	4	4	4	43
28	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	46
29	4	4	3	4	5	3	3	4	4	4	4	42
30	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	44
31	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	41
32	4	5	5	4	5	4	2	2	4	4	4	43
33	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	48
34	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	48
35	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	46

## LAMPIRAN HASIL SPSS

### A. Frekuensi Variabel

#### 1. *Assets Inventory*

**Statistics**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N	Valid	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4,3714	4,2857	4,2000	4,3714	4,1714
Sum		153,00	150,00	147,00	153,00	146,00

**X1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	3	8,6	8,6	8,6
	Setuju	16	45,7	45,7	54,3
	Sangat Setuju	16	45,7	45,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	2	5,7	5,7	5,7
	Setuju	21	60,0	60,0	65,7
	Sangat Setuju	12	34,3	34,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	6	17,1	17,1	17,1
	Setuju	16	45,7	45,7	62,9
	Sangat Setuju	13	37,1	37,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X1.4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	1	2,9	2,9	2,9
Setuju	20	57,1	57,1	60,0
Sangat Setuju	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**X1.5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	4	11,4	11,4	11,4
Setuju	21	60,0	60,0	71,4
Sangat Setuju	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**2. Assets Legal Audit****Statistics**

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
N Valid	35	35	35	35	35	35	35
Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,0000	4,2571	3,9429	3,9429	3,6000	4,0000	3,9143
Sum	140,00	149,00	138,00	138,00	126,00	140,00	137,00

**X2.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	6	17,1	17,1	17,1
Setuju	23	65,7	65,7	82,9
Sangat Setuju	6	17,1	17,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**X2.2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	5	14,3	14,3	14,3
Setuju	16	45,7	45,7	60,0
Sangat Setuju	14	40,0	40,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	8,6	8,6	8,6
	Ragu-Ragu	4	11,4	11,4	20,0
	Setuju	20	57,1	57,1	77,1
	Sangat Setuju	8	22,9	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
	Ragu-Ragu	6	17,1	17,1	20,0
	Setuju	22	62,9	62,9	82,9
	Sangat Setuju	6	17,1	17,1	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	6	17,1	17,1	17,1
	Ragu-Ragu	7	20,0	20,0	37,1
	Setuju	17	48,6	48,6	85,7
	Sangat Setuju	5	14,3	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	10	28,6	28,6	28,6
	Setuju	15	42,9	42,9	71,4
	Sangat Setuju	10	28,6	28,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X2.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	8	22,9	22,9	22,9
	Setuju	22	62,9	62,9	85,7
	Sangat Setuju	5	14,3	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**3. Assets Valuation****Statistics**

		X3.1	X3.2	X3.3
N	Valid	35	35	35
	Missing	0	0	0
Mean		3,7714	4,0286	3,9143
Sum		132,00	141,00	137,00

**X3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	8,6	8,6	8,6
	Ragu-Ragu	7	20,0	20,0	28,6
	Setuju	20	57,1	57,1	85,7
	Sangat Setuju	5	14,3	14,3	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**X3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	6	17,1	17,1	17,1
	Setuju	22	62,9	62,9	80,0
	Sangat Setuju	7	20,0	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	



### X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
Ragu-Ragu	8	22,9	22,9	25,7
Valid Setuju	19	54,3	54,3	80,0
Sangat Setuju	7	20,0	20,0	100,0
Total	35	100,0	100,0	

#### 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Statistics		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3,4571	3,6286	3,7143	3,9429	3,8857	3,6857	4,0000	4,0857
Sum		121,00	127,00	130,00	138,00	136,00	129,00	140,00	143,00

#### M1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
Tidak Setuju	2	5,7	5,7	8,6
Valid Ragu-Ragu	14	40,0	40,0	48,6
Setuju	16	45,7	45,7	94,3
Sangat Setuju	2	5,7	5,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

#### M2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	17	48,6	48,6	48,6
Valid Setuju	14	40,0	40,0	88,6
Sangat Setuju	4	11,4	11,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**M3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	18	51,4	51,4	51,4
	Setuju	9	25,7	25,7	77,1
	Sangat Setuju	8	22,9	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**M4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
	Ragu-Ragu	8	22,9	22,9	25,7
	Setuju	18	51,4	51,4	77,1
	Sangat Setuju	8	22,9	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**M5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
	Ragu-Ragu	9	25,7	25,7	28,6
	Setuju	18	51,4	51,4	80,0
	Sangat Setuju	7	20,0	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**M6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	2	5,7	5,7	5,7
	Ragu-Ragu	9	25,7	25,7	31,4
	Setuju	22	62,9	62,9	94,3
	Sangat Setuju	2	5,7	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**M7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	5	14,3	14,3	14,3
Setuju	25	71,4	71,4	85,7
Sangat Setuju	5	14,3	14,3	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**M8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	7	20,0	20,0	20,0
Setuju	18	51,4	51,4	71,4
Sangat Setuju	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**5. Quality Of Regional Government Financial Reporting**

**Statistics**

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11
Valid N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,1714	4,3429	4,2000	4,085	4,600	4,114	3,600	3,657	4,057	4,08	4,171
Sum	146,00	152,00	147,00	143,0	161,0	144,0	126,0	128,0	142,0	143,00	146,0

**Y1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	3	8,6	8,6	8,6
Setuju	23	65,7	65,7	74,3
Sangat Setuju	9	25,7	25,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	1	2,9	2,9	2,9
Setuju	21	60,0	60,0	62,9
Sangat Setuju	13	37,1	37,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	3	8,6	8,6	8,6
Setuju	22	62,9	62,9	71,4
Sangat Setuju	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	3	8,6	8,6	8,6
Setuju	26	74,3	74,3	82,9
Sangat Setuju	6	17,1	17,1	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	2	5,7	5,7	5,7
Setuju	10	28,6	28,6	34,3
Sangat Setuju	23	65,7	65,7	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	6	17,1	17,1	17,1
Setuju	19	54,3	54,3	71,4
Sangat Setuju	10	28,6	28,6	100,0
Total	35	100,0	100,0	

**Y7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	8,6	8,6	8,6
	Ragu-Ragu	11	31,4	31,4	40,0
	Setuju	18	51,4	51,4	91,4
	Sangat Setuju	3	8,6	8,6	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Y8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	8,6	8,6	8,6
	Ragu-Ragu	8	22,9	22,9	31,4
	Setuju	22	62,9	62,9	94,3
	Sangat Setuju	2	5,7	5,7	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Y9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	1	2,9	2,9	2,9
	Ragu-Ragu	3	8,6	8,6	11,4
	Setuju	24	68,6	68,6	80,0
	Sangat Setuju	7	20,0	20,0	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

**Y10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	5	14,3	14,3	14,3
	Setuju	22	62,9	62,9	77,1
	Sangat Setuju	8	22,9	22,9	100,0
	Total	35	100,0	100,0	

### Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	5	14,3	14,3	14,3
Setuju	19	54,3	54,3	68,6
Sangat Setuju	11	31,4	31,4	100,0
Total	35	100,0	100,0	

## B. Uji Kualitas Instrumen

### 1. *Assets Inventory*

		<i>Correlations</i>				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
X1.1	Pearson Correlation	1	,261	,279	,347*	,278
	Sig. (2-tailed)		,129	,105	,041	,106
	N	35	35	35	35	35
X1.2	Pearson Correlation	,261	1	,214	,309	,356*
	Sig. (2-tailed)	,129		,217	,071	,036
	N	35	35	35	35	35
X1.3	Pearson Correlation	,279	,214	1	,105	,582**
	Sig. (2-tailed)	,105	,217		,550	,000
	N	35	35	35	35	35
X1.4	Pearson Correlation	,347*	,309	,105	1	,415*
	Sig. (2-tailed)	,041	,071	,550		,013
	N	35	35	35	35	35
X1.5	Pearson Correlation	,278	,356*	,582**	,415*	1
	Sig. (2-tailed)	,106	,036	,000	,013	
	N	35	35	35	35	35
Inventarisasi	Pearson Correlation	,650**	,615**	,689**	,613**	,789**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35

\*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### *Reliability Statistics*

Cronbach's Alpha	N of Items
,694	5

## 2. Assets Legal Audit

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Legal Audit
X2.1	Pearson Correlation	1	,283	,709**	,362*	,314	,581**	,243	,664**
	Sig. (2-tailed)		,100	,000	,033	,066	,000	,160	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.2	Pearson Correlation	,283	1	,376*	,400*	,471**	,712**	,602**	,741**
	Sig. (2-tailed)	,100		,026	,017	,004	,000	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.3	Pearson Correlation	,709**	,376*	1	,456**	,416*	,458**	,219	,713**
	Sig. (2-tailed)	,000	,026		,006	,013	,006	,205	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.4	Pearson Correlation	,362*	,400*	,456**	1	,419*	,561**	,550**	,716**
	Sig. (2-tailed)	,033	,017	,006		,012	,000	,001	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.5	Pearson Correlation	,314	,471**	,416*	,419*	1	,487**	,600**	,746**
	Sig. (2-tailed)	,066	,004	,013	,012		,003	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.6	Pearson Correlation	,581**	,712**	,458**	,561**	,487**	1	,626**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,006	,000	,003		,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
X2.7	Pearson Correlation	,243	,602**	,219	,550**	,600**	,626**	1	,732**
	Sig. (2-tailed)	,160	,000	,205	,001	,000	,000		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35
Legal Audit	Pearson Correlation	,664**	,741**	,713**	,716**	,746**	,847**	,732**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		
	N	35	35	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,855	7





M4	Pearson	,608*	,684*	,673*	1	,293	-,036	,071	,009	,703**
	Correlation	*	*	*						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,088	,838	,686	,957	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
M5	Pearson	,372*	,310	,605*	,293	1	,215	,000	,461*	,686**
	Correlation			*					*	
	Sig. (2-tailed)	,028	,070	,000	,088		,215	1,00	,005	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
M6	Pearson	,108	,121	-,008	-,036	,215	1	,642*	,368*	,440**
	Correlation							*		
	Sig. (2-tailed)	,537	,490	,966	,838	,215		,000	,029	,008
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
M7	Pearson	,133	,157	-,066	,071	,000	,642*	1	,386*	,407*
	Correlation						*			
	Sig. (2-tailed)	,447	,367	,708	,686	1,00	,000		,022	,015
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
M8	Pearson	,032	-,054	,247	,009	,461*	,368*	,386*	1	,475**
	Correlation					*				
	Sig. (2-tailed)	,854	,759	,153	,957	,005	,029	,022		,004
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Kompetensi SDM	Pearson	,686*	,713*	,773*	,703*	,686*	,440*	,407*	,475*	1
	Correlation	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,008	,015	,004	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,770	8

## 5. Quality Of Regional Government Financial Reporting

### Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Kualitas Laporan Keuangan
Y1	Pearson Correlation	1	,283	,160	,356*	,549**	,560**	,495**	,147	,053	,295	,466**	,633**
	Sig. (2-tailed)		,100	,360	,036	,001	,000	,003	,400	,761	,086	,005	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y2	Pearson Correlation	,283	1	,430*	,642**	,524**	,454**	-,085	-,142	,198	-,003	,406*	,495**
	Sig. (2-tailed)	,100		,010	,000	,001	,006	,629	,416	,255	,988	,015	,002
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y3	Pearson Correlation	,160	,430*	1	,437**	,067	,462**	-,013	-,042	,362*	,033	,212	,427*
	Sig. (2-tailed)	,360	,010		,009	,703	,005	,941	,812	,032	,851	,220	,011
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y4	Pearson Correlation	,356*	,642**	,437**	1	,403*	,485**	,240	,162	,620**	,260	,654**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,036	,000	,009		,016	,003	,166	,352	,000	,132	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y5	Pearson Correlation	,549**	,524**	,067	,403*	1	,619**	,214	,081	,213	,334*	,617**	,660**
	Sig. (2-tailed)	,001	,001	,703	,016		,000	,218	,645	,218	,050	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y6	Pearson Correlation	,560**	,454**	,462**	,485**	,619**	1	,483**	,202	,189	,260	,676**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,005	,003	,000		,003	,244	,278	,132	,000	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y7	Pearson Correlation	,495**	-,085	-,013	,240	,214	,483**	1	,482**	,166	,447**	,481**	,612**
	Sig. (2-tailed)	,003	,629	,941	,166	,218	,003		,003	,339	,007	,003	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y8	Pearson Correlation	,147	-,142	-,042	,162	,081	,202	,482**	1	,424*	,333	,248	,463**
	Sig. (2-tailed)	,400	,416	,812	,352	,645	,244	,003		,011	,051	,151	,005
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y9	Pearson Correlation	,053	,198	,362*	,620**	,213	,189	,166	,424*	1	,438**	,462**	,598**
	Sig. (2-tailed)	,761	,255	,032	,000	,218	,278	,339	,011		,008	,005	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y10	Pearson Correlation	,295	-,003	,033	,260	,334*	,260	,447**	,333	,438**	1	,542**	,590**
	Sig. (2-tailed)	,086	,988	,851	,132	,050	,132	,007	,051	,008		,001	,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Y11	Pearson Correlation	,466**	,406*	,212	,654**	,617**	,676**	,481**	,248	,462**	,542**	1	,841**
	Sig. (2-tailed)	,005	,015	,220	,000	,000	,000	,003	,151	,005	,001		,000
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	,633**	,495**	,427*	,740**	,660**	,787**	,612**	,463**	,598**	,590**	,841**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,011	,000	,000	,000	,000	,005	,000	,000	,000	
	N	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,800	10

### C. Uji Asumsi Klasik

#### *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

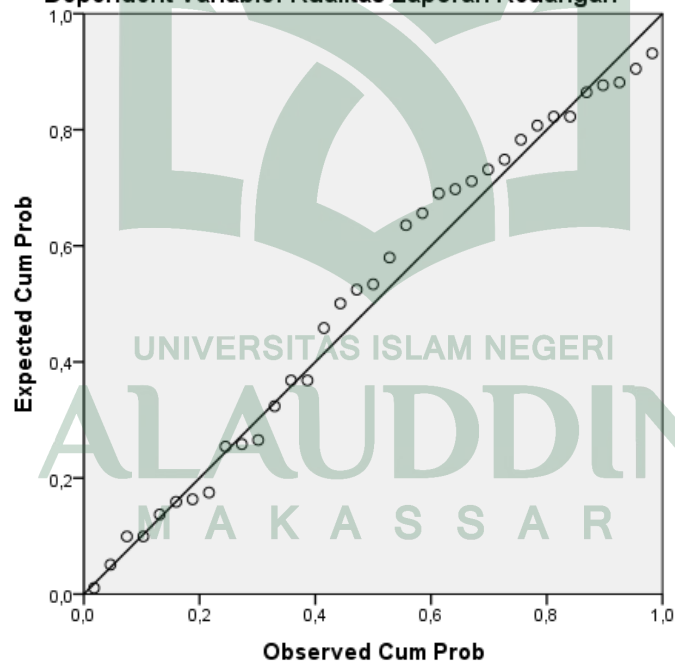
		Unstandardize d Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,63546582
	Absolute	,102
Most Extreme Differences	Positive	,069
	Negative	-,102
Kolmogorov-Smirnov Z		,601
Asymp. Sig. (2-tailed)		,863

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
<i>Assets Inventory</i>	,597	1,676
<i>Assets Legal Audit</i>	,518	1,930
<i>Assets Valuation</i>	,670	1,494
Kompetensi SDM	,699	1,431

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

**D. Uji Hipotesis**

1. Regresi Berganda

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,783 <sup>a</sup>	,613	,576	2,79625

a. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	384,353	3	128,118	16,385	,000 <sup>b</sup>
	Residual	242,390	31	7,819		
	Total	626,743	34			

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

b. Predictors: (Constant), *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, *Assets Valuation*

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	11,426	5,205		2,195	,036
<i>Assets Inventory</i>	,641	,296	,312	2,163	,038
<i>Assets Legal Audit</i>	,356	,170	,316	2,093	,045
<i>Assets Valuation</i>	,861	,308	,349	2,800	,009

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

## 2. Regresi Moderating Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

*Model Summary*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,830 <sup>a</sup>	,689	,609	2,68572

a. Predictors: (Constant), X3\_M, Zscore: *Assets Valuation*, Zscore: *Assets Inventory*, Zscore: *Kompetensi SDM*, X2\_M, X1\_M, Zscore: *Assets Legal Audit*

*ANOVA<sup>a</sup>*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431,990	7	61,713	8,556	,000 <sup>b</sup>
	Residual	194,753	27	7,213		
	Total	626,743	34			

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*

b. Predictors: (Constant), X3\_M, Zscore: *Assets Valuation*, Zscore: *Assets Inventory*, Zscore: *Kompetensi SDM*, X2\_M, X1\_M, Zscore: *Assets Legal Audit*

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43,536	,971		44,823	,000
	Zscore: <i>Assets Inventory</i>	,966	,621	,225	1,554	,132
	Zscore: <i>Assets Legal Audit</i>	1,487	,670	,346	2,219	,035
	Zscore: <i>Assets Valuation</i>	1,382	,567	,322	2,437	,022
	Zscore: <i>Kompetensi SDM</i>	,767	,591	,179	1,299	,205
	X1_M	-,059	,923	-,010	-,064	,949
	X2_M	2,081	,942	,301	2,209	,036
	X3_M	-,303	1,154	-,043	-,263	,795

a. Dependent Variable: *Quality Of Regional Government Financial Reporting*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ☎ 424835, Fax424836

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penelitian skripsi saudara JUIMARLIANA: 90400114160, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap *Qaulity Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke **Ujian Munaqasyah**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa,

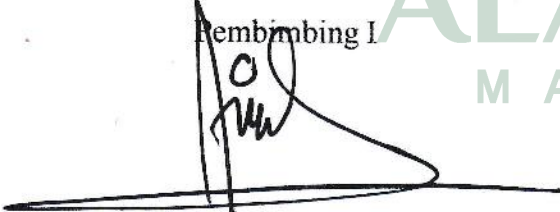
2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Jamaluddin M. S.E., M.Si**  
**NIP. 19720611 200801 1 013**

  
**Nur Rahma Sari S.E., M.Acc., Ak**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

**PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING**

Pengujian Pembimbing penelitian skripsi saudara **Juimarliana**, NIM :90400114160, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“Pengaruh Pengelolaan Aset Tetap Terhadap *Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada ujian **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa,

November 2018

**Dosen Penguji dan Pembimbing**

Penguji 1 : Dr. H. Abd. Wahab, S.E., M. Si

Penguji 2 : Dr. Urbanus Uma Leu, M. Ag

Pembimbing 1 : Jamaluddin Majid, S.E., M.Si.

Pembimbing 2 : Nur Rahma Sari S.E., M.Acc. Ak





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romang polong – Gowa. ☎ 424835, Fax 424836

**PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN**

Nomor : /EB/2018

Proposal penelitian saudara **JUIMARLIANA**, NIM: 90400114160, Mahasiswa Jurusan **AKUNTANSI** pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal penelitian dengan judul **“Pengaruh *Assets Inventory*, *Assets Legal Audit*, dan *Assets Valuation* Terhadap *Quality of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)”**. Memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah diseminarkan dan memenuhi persyaratan ilmiah untuk mengikuti tahap ujian KOMPREHENSIF dan melaksanakan penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa,

Juni 2018

Penyusun,

**JUIMARLIANA**

UNIVERSITAS NIM. 90400114160

Pembimbing I

**Jamaluddin M., S.E., M.Si**  
NIP. 19710402 200003 1 002

Pembimbing II

**Nur Rahma Sari, S.E., M.Acc., Ak**

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi

**Jamaluddin M., S.E., M.Si**  
NIP. 19720611 200801 1 013

Nomor : *7065*/EB.1/PP.00.9/11/2018  
Sifat : *Penting*  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, *21* November 2018

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

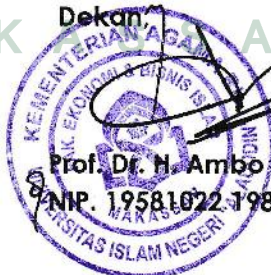
Nama	: Juimarliana
NIM	: 90400114160
Jurusan	: AKUNTANSI
Judul Skripsi	: "Pengaruh asset inventory, asset legal audit dan aset valuation terhadap quality of regional government financial reporting dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD kabupaten Jeneponto)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 22 November 2018
Waktu	: 13.00 - 15.30 Wita
Tempat	: Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

NIP. 19581022-198703 1 002

Nomor : *072* /EB.1/PP.00.9/11/2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata *07* November 2018

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Juimarliana  
NIM : 90400114160  
Jurusan : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : Pengaruh asset inventory, asset legal audit dan aset valuation terhadap quality of regional government financial reporting dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD kabupaten Jeneponto)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 November 2018  
Waktu : 14.00 - 15.00  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong – Gowa Tlp. (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : 4951 /EB.I/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Seminar Proposal  
A.n. Juimarliana/90400114160

Samata, 26 Juni 2018

Kepada Yth :

1. Jamaluddin M, SE., M.Si. Sebagai Pembimbing I
2. Nur Rahma Sari, SE.Acc.,Ak. Sebagai Pembimbing II

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang bapak untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis ,28 Juni 2018  
Waktu : 09.00 – 12.00  
Judul Skripsi : Pengaruh Asset Inventory, Assets legal, audit dan Assets Valuation terhadap Quality of Regional Government Financial reporting dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating ( Studi pada SKPD Kabupaten Jeneponto )  
Tempat : Ruang . 207

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

Wasalam

Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag

NIP. 19581022 198703 1 002





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1817 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Juimarliana, NIM : 90400114160  
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Juimarliana, NIM: 90400114160** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
**Sekretaris** : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
**Pembimbing** : Jamaluddin M., SE., M.Si.  
**Pembimbing II** : Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak.  
**Penguji I** : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.  
**Penguji II** : Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.  
**Pelaksana** : Roshani

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 05 November 2018

Dekan,



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. *h*  
NIP. 19581022 198703 1 002





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1000 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Juimarliana** : NIM: 90400114160
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makas
  - 7.
  8. sar;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:  

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
<b>Sekretaris</b>	: Sukmawati, S.Ag.
<b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>	: Drs. Thamrin Logawali, MH
<b>Penguji Akuntansi Keuangan</b>	: Mustakim Muchlis, SE., M.Si.
<b>Penguji Auditing</b>	: Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak.
<b>Pelaksana</b>	: Rusmawandi Rara
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 26 Juli 2018  
Dekan,

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.  
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 628 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBIMBING / PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama : **Juimarlina**, Nim : **90400114160** tertanggal Untuk Mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **Pengaruh Assest Inventory, Assests Legal Audit, dan Assests Valuation Terhadap Quality of Regional Government Financial Reporting Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating.**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu kelancaran penelitian dan penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas Sebagai pembimbing / pembantu pembimbing penyusunan Skripsi mahasiswa Tersebut Ditas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 Yang Disempurnakan Dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Menjadi Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Agama.  
6. Peraturan Menteri Agama RI. 25 Tahun 2013 Dan Peraturan Menteri Agama RI. No. 85 Tahun 2013 Jo Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :  
**1. Jamaluddin Majid, S.E., M.Si.**  
**2. Nur Rahma Sari, SE., M.Acc.**
- Kedua** : Tugas Pembimbing / Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan Skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan Ini Disampaikan Kepada Masing-Masing Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan Dengan Penuh Tanggungjawab

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada Tanggal : 19 Maret 2018  
Dekan



**Hal : PERMOHONAN UJIAN MUNAQASYAH**

Samata-Gowa, 16 November 2018

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar:

Nama : Juimarliana

NIM : 90400114160

Semester : SEMBILAN ( IX )

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Asset Inventory, Assets legal, audit dan Assets Valuation terhadap Quality of Regional Government Financial reporting dengan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating ( Studi pada SKPD Kabupaten Jeneponto )

Demikian Permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Menyetujui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Jamaluddin, M.SE., M. Si  
Nip.197206112008011013

Yang bermohon

Juimarliana  
90400114160

Disposisi:

**UJIAN MUNAQASYAH** tersebut dilaksanakan sebagai berikut :

1. TIM UJIAN MUNAQASYAH

Ketua	:
Sekretaris	:
Pembimbing I	: Jamaluddin M, SE., M.Si
Pembimbing II	: Nur Rahma Sari, SE.Acc.,Ak
Penguji I	: Dr.H.Abdul Wahab, SE.,M.Si
Penguji II	: Drs. Urbanus Uma Leu, M.Ag
Pelaksana	:
Tempat	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Hari/Tanggal/Jam	:

Samata-Gowa, 16 November 2018










**NAMA BERITA ACARA UJIAN HASIL  
PROGRAM STRATA SATU  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini **Senin Tanggal 12 November Tahun 2018** Jam **14.00 - 15.00 WITA** Panitia Ujian (SK Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor **1817** Tahun 2018) telah melaksanakan Ujian Hasil untuk memenuhi sebagian syarat Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar atas mahasiswa

**Nama : Juimarliana**  
**NIM : 90400114160**  
**Jurusan : AKUNTANSI**

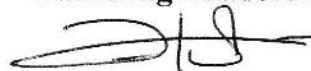
Judul Skripsi yang di Ujikan : **Pengaruh asset inventory, asset legal audit dan aset valuation terhadap quality of regional government financial reporting dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderating (Studi pada SKPD kabupaten Jeneponto)**

**PANITIA UJIAN HASIL**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.	Ketua	1. 
2	Dr. Syaharuddin, M.Si.	Sekretaris	2. 
3	Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.	Penguji I	3. 
4	Dr. Urbanus Uma Leu, M.Ag.	Penguji II	4. 
5	Jamaluddin M., SE., M.Si.	Pembimbing I	5. 
6	Nur Rahma Sari, SE., M.Acc., Ak.	Pembimbing II	6. 
7	Roshani	Pelaksana	7. 

Samata – Gowa, ..... 2018

**An. Dekan**  
**Kasubbag Akademik**



## SURAT KETERANGAN TURNITIN

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : Juimarliana  
NIM : 90400114160  
Judul : Pengaruh *Assets Inventory, Assets Legal Audit, dan Assets Valuation Terhadap Quality Of Regional Government Financial Reporting* Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Jeneponto)  
Pembimbing I : Jamuluddin. M. SE, M.Si  
Pembimbing II : Nur Rahma Sari. SE. M. Acc. Ak

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar 19%. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak\*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Hasil.

Makassar, 18 Oktober 2018

Mengetahui

(Pembimbing)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSAR

TIM Instruktur FEBI

Satriani S.I.P.

\*Coret yang tidak perlu

\*Catatan:

1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"  
25-49% : "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"  
50-74% : "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"  
75-100%





1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 3 5 5 2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 3610/S.01/PTSP/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bupati Jeneponto

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 5046/EB.I/PP.00.9/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **JUIMARLIANA**  
Nomor Pokok : 90400114160  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH ASSETS INVENTORY, ASSET LEGAL AUDIT DAN ASSET VALUATION TERHADAP QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA SKPD KABUPATEN JENEPONTO) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Juli s/d 24 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 25 Juli 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-2410044 Jeneponto

Nomor : 0176/IPT/DPMPTSP/JP/VII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 30 Juli 2018  
Kepada :  
Yth. Kepala OPD se- Kabupaten Jeneponto  
Di,-  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No Surat 3610/S.01/PTSP/2018, Tanggal 25 Juli 2018, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : JUIMARLIANA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : 90400114160  
Program Studi : Akuntansi  
Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Karang Rejo Kota Tarakan

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

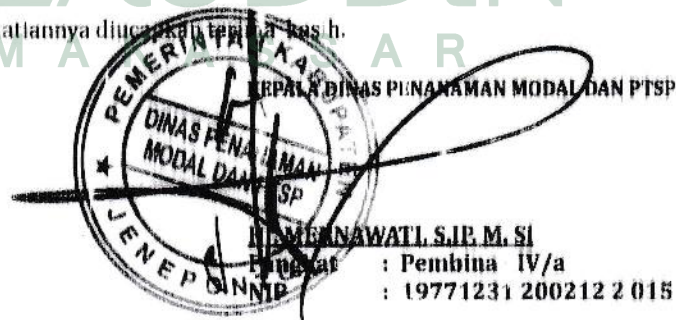
**"PENGARUH ASSETS INVENTORY, ASSETS LEGAL AUDIT, DAN ASSET VALUATION TERHADAP QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI PADA SKPD KABUPATEN JENEPONTO)"**

yang berlangsung tanggal 25 Juli 2018 s/d 24 September 2018

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip



## RIWAYAT HIDUP



JUIMARLIANA, dilahirkan di Sandakan, Sabah, Malaysia pada tanggal 29 November tahun 1995. Penulis merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Alamuddin dan Ibunda Siti Hadenah. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar SDN 018 Karang Rejo Tarakan pada tahun 2002 hingga tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Tarakan pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Pada tahun tersebut penulis juga melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Tarakan hingga tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2018.

### Contact Person:

Email : [juimarliana\\_emli@yahoo.com](mailto:juimarliana_emli@yahoo.com)

No. Hp: 082-214-352-521

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R